



# **PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, Pemerintah telah mengamanatkan di dalam PP nomor 60 Tahun 2008 supaya seluruh tingkat pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif.

Selanjutnya untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut, Pemerintah di dalam RPJMN tahun 2015-2019 secara khusus telah memasukkan peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan. Hal ini dipertegas kembali oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern dengan tema Peningkatan Kapabilitas APIP tanggal 13 Mei 2015 di Jakarta. Salah satu perintah Presiden adalah agar kapabilitas APIP di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2019 berada pada Level 3 (*Integrated*), jika dinilai dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model (IACM)* yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)* tahun 2009. Sebagaimana diketahui dalam kerangka *Internal Audit Capability Model (IACM)* kapabilitas pengawasan intern dikelompokkan menjadi lima tingkatan yaitu Level 1 (*initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed* level kapabilitas APIP, dan level 5 (*Optimizing*).

Seiring dengan pelaksanaan program dimaksud Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyusun pedoman teknis untuk dipergunakan oleh seluruh unit APIP di Indonesia yang mencakup penilaian kapabilitas secara mandiri (*self Assessment*), penjaminan kualitas (*quality assurance*) hasil penilaian kapabilitas, peningkatan kapabilitas secara mandiri (*self improvement*), dan pemantauan dan

evaluasi peningkatan kapabilitas APIP.

Pedoman teknis penilaian kapabilitas APIP secara mandiri (*Self Assessment*) ini merupakan panduan bagi semua unit APIP dalam melakukan kegiatan penilaian kapabilitas yang dimiliki. Melalui pelaksanaan penilaian kapabilitas ini, setiap unit APIP akan dapat mengetahui level kapabilitas yang dimiliki dan juga informasi mengenai area-area yang masih memerlukan pengembangan sebagai dasar penyusunan rencana tindak (*action plan*) dalam mencapai level kapabilitas yang lebih tinggi untuk menuju APIP yang efektif.

Penggunaan pedoman ini harus didukung dengan pemahaman yang memadai mengenai kerangka pikir *Internal Audit Capability Model*. Pemahaman yang kurang memadai dapat berakibat pada dihasilkannya penilaian yang tidak menggambarkan kondisi kapabilitas yang sesungguhnya. Sebagaimana diketahui bersama, program peningkatan kapabilitas APIP tidak ditujukan sekedar mencapai tingkat/level kapabilitas tertentu saja melainkan untuk membangun satu unit APIP yang mampu melaksanakan perannya sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dimana unit APIP tersebut berada.

Kami menyadari pedoman ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan. Untuk tujuan penyempurnaan, pedoman ini juga akan dipantau aplikabilitasnya serta disesuaikan dengan perkembangan terkini dari teori dan praktik-praktik terbaik di dunia pengawasan intern dan dinamika pemerintahan di Indonesia.

Jakarta, Agustus 2015

Kepala BPKP



Ardan Adiperdana

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR ISTILAH	iii
BAB I      PENDAHULUAN	1
A.    Latar Belakang	1
B.    Tujuan	2
C.    Dasar Pelaksanaan Penilaian Mandiri	3
BAB II     PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP	4
A.    Pendahuluan	4
B.    Organisasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri	10
C.    Jenis Penilaian	11
D.    Sarana – Media Penilaian	11
E.    Ruang Lingkup Penilaian	12
F.    Cara Penilaian	12
G.    Penjaminan Kualitas Penilaian	18
H.    Tindak Lanjut Hasil Penilaian	19
BAB III    PENUTUP	20
LAMPIRAN	
1. Data Umum APIP	
2. Formulir Isian Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	
3. Contoh Laporan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	

## DAFTAR ISTILAH

**Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:**

**Kapabilitas APIP** adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif

**Penilaian mandiri (*self assessment*)** adalah Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai efektivitas APIP yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia melalui penilaian elemen-elemen yang tercantum dalam *Internal Audit Capability Model (IACM)*

**Peningkatan mandiri (*self improvement*)** adalah Merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan SDM APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif

**Penjaminan kualitas (*quality assurance*)** adalah Mengetahui efektivitas APIP yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia melalui penilaian elemen-elemen yang tercantum dalam IACM, memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungannya, meyakinkan unit APIP dalam pemenuhan bukti-bukti dan membantu perbaikan yang terkait permasalahan dan hambatan APIP dalam mengembangkan kapabilitasnya

**Pemantauan (*monitoring*)** adalah Mengetahui efektivitas APIP yang menjadi sasaran kegiatan penilaian kapabilitas, memantau perkembangan pelaksanaan atas action plan yang disusun dan dilaksanakan sendiri oleh APIP dalam rangka menuju ke tingkat kapabilitas ke level yang lebih tinggi, memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungannya, serta solusi dalam menghilangkan hambatan tersebut

**Peran dan layanan APIP (*services and role of IA*)** adalah Peran dan layanan yang diberikan APIP untuk dapat melakukan penilaian yang independen dan obyektif dalam rangka memberi nilai tambah bagi organisasi K/L/Pemda sangat tergantung kepada kewenangan yang diterima APIP dan komitmen pimpinan organisasi

**Pengelolaan SDM (*people management*)** adalah Suatu proses mulai dari merekrut, menempatkan, mengembangkan kompetensi dan karier SDM, memberikan insentif, sampai dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang memungkinkan pegawai untuk memberikan kemampuan terbaik mereka secara optimal

**Praktik profesional (*professional practises*)** adalah Menunjukkan gambaran secara lengkap mengenai kebijakan, proses, dan praktik yang menjamin pemeliharaan kualitas kerja APIP agar kegiatan APIP dilaksanakan secara efektif dengan kemampuan dan kecermatan profesi sesuai dengan standar dan kode etik profesi

**Akuntabilitas dan manajemen kinerja (*performance management accountability*)** adalah Mencakup kegiatan penyediaan informasi kinerja yang dibutuhkan baik keuangan maupun

nonkeuangan dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasional APIP dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP

**Budaya dan hubungan organisasi (*organizational relationship and culture*)** adalah Mencakup budaya dan hubungan internal organisasi serta lingkungan APIP, dan bagaimana budaya dan hubungan organisasi tersebut memberikan dampak terhadap para pemangku kepentingan utama dan pihak lain di luar organisasi

**Struktur tata kelola (*governances structures*)** adalah Hubungan pelaporan mencakup hubungan pimpinan APIP dengan jajaran pimpinan dalam organisasi K/L/P dan pihak lain di luar organisasi, ketersediaan sarana prasarana, dan kebijakan organisasi yang mendukung terciptanya keselarasan kegiatan APIP dengan struktur tata kelola organisasi K/L/P secara keseluruhan

**Area proses kunci (*key process area/KPA*)** adalah Merupakan bangunan utama yang menentukan kapabilitas suatu APIP yang mengidentifikasi apa yang seharusnya ada dan berkelanjutan pada tingkat kapabilitas tertentu sebelum penyelenggaraan aktivitas pengawasan intern bisa meningkat pada level berikutnya

**Rencana tindak (*action plan*)** adalah Rencana rinci pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya yang dirumuskan oleh APIP

**Model kapabilitas pengawasan intern (*internal audit capability moel/IACM*)** adalah fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik, yang menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam rangka mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional, yang menunjukkan langkah-langkah menuju kondisi tingkat kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan efektif

**Area yang memerlukan perbaikan (*area of improvement/ AOI*)** adalah Bidang-bidang dalam Area Proses Kunci yang berdasarkan hasil evaluasi Kapabilitas APIP masih memerlukan perbaikan dalam rangka peningkatan kapabilitasnya

**Tingkat (*level*) kapabilitas** adalah Menggambarkan karakteristik dan kapabilitas APIP pada tingkatan tertentu, yaitu; intial (level 1), infrastructure (level 2), integrated (level 3), managed (level 4), dan optimizing (level 5).

**PEDOMAN TEKNIS  
PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS  
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbagai pengertian atau definisi tata kelola (*Governance*) telah dikeluarkan oleh banyak pihak, baik dari lembaga/badan internasional maupun dari lembaga di dalam negeri. Namun pada dasarnya tata kelola merupakan suatu kombinasi kebijakan, prosedur, proses dan struktur yang diterapkan oleh organisasi untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya.

Dari pengertian di atas tersirat bahwa penerapan tata kelola tidak terlepas dari tujuan suatu organisasi, oleh karenanya pendekatan untuk menerapkan tata kelola di setiap organisasi dapat berbeda-beda tergantung dari tujuan masing-masing organisasi. Perbedaan pendekatan dalam penerapan tata kelola di suatu daerah bisa terjadi pula di lingkungan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP), terlebih dengan adanya perbedaan kapasitas dan kapabilitas di antara APIP di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan dari hasil pemetaan leveling APIP yang dilakukan oleh Pusbin JFA BPKP yang mengacu pada *Internal Audit Capability Model (IACM)* pada tahun 2010. Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP sampai dengan tahun 2014 kondisi tersebut mengalami perbaikan sedikit walau sebagian besar masih berada di level 1 sebagaimana laporan Kepala BPKP kepada presiden pada saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern tanggal 13 Mei 2015 yaitu sekitar 85 % masih berada pada level 1 dan 14 % berada di level 2, serta sisanya 1 % berada di level 3 dari lima level yang dijadikan acuan.

Level kapabilitas ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas tata kelola suatu APIP karena salah satu kriteria dari suatu tata kelola yang baik (Widyananda, 2008) adalah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Oleh karenanya APIP dalam kapasitasnya sebagai auditor internal pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat memberikan penilaian independen dan objektif atas efektifitas operasi dari proses tata kelola organisasi guna memberi nilai tambah bagi organisasi. Peningkatan efektifitas APIP dapat mendorong efektifitas instansi pemerintah di lingkungan organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P) tempat APIP bernaung yang pada gilirannya akan meningkatkan efektifitas tata kelola organisasi secara keseluruhan. Hal penting yang harus disadari oleh setiap APIP adalah adanya keterkaitan erat antara tata kelola dengan manajemen risiko dan pengendalian internal.

Ketiga hal tersebut saling terkait dan harus diintegrasikan dalam usaha APIP untuk terus meningkatkan efektifitas tata kelolanya. Oleh karenanya APIP harus senantiasa mempertimbangkan risiko pada saat menyusun rencana dan strateginya dan mengkomunikasikan efektifitas dari pengendalian internalnya kepada pimpinan. Demikian pula sebaliknya, APIP dalam mengelola risiko harus mendasarkan pada tata kelola yang



efektif yang antara lain tercermin dari kepedulian dan komitmen pimpinan serta tindakan pengendalian yang diambil organisasi dalam pengelolaan risikonya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Meskipun level kapabilitas APIP di Indonesia bervariasi, namun pada dasarnya setiap APIP memiliki tujuan yang sama yaitu membantu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di lingkungannya dalam mencapai tujuannya dengan melakukan kegiatan penjaminan (*assurance*) dan pemberian saran (*advice*) secara independen dan obyektif terhadap efektivitas manajemen Risiko, kecukupan pengendalian dan efektivitas tata kelola organisasinya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka pembinaan tata kelola APIP, BPKP memandang perlu untuk melakukan kegiatan penilaian terkait penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada model yang telah dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)* yaitu *Internal Audit Capability Model (IACM)* dan telah disesuaikan seperlunya yang mencakup elemen-elemen tata kelola secara menyeluruh dan keterkaitannya dengan pengelolaan risiko, dan pengendalian internal. Penilaian atas penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada *Internal Audit Capability Model* mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :

1. Peran dan Layanan APIP (*Services and Role of Internal Auditing*)
2. Pengelolaan SDM (*People Management*)
3. Praktik Profesional (*Professional Practices*)
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)
5. Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)
6. Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)

## **B. Tujuan**

Tujuan pedoman teknis penilaian mandiri (*self assessment*) atas tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah adalah untuk:

1. mengetahui efektivitas APIP yang menjadi sasaran kegiatan *assessment* (evaluasi) yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia melalui penilaian elemen-elemen yang tercantum dalam *IACM*;
2. memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungannya;
3. mengembangkan *road map* untuk perbaikan yang terarah bagi peningkatan kapabilitasnya.

### C. Dasar Pelaksanaan Penilaian Mandiri

Penilaian kapabilitas seluruh organisasi APIP di Indonesia merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah secara nasional yang dituangkan dalam bentuk ketentuan atau arahan resmi Pemerintah, yaitu:

1. Arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional APIP pada tanggal 13 Mei 2015 di BPKP Pusat agar dalam 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2019) 85% APIP berada pada Level 3.
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 dimana APIP diharapkan memiliki kapabilitas pada Level 3 (*integrated*);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

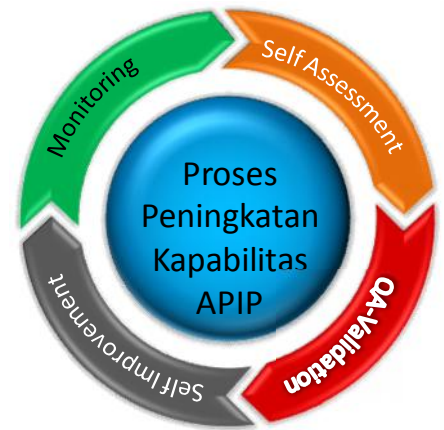
Salah satu langkah di dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern yang adalah dengan mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP

#### A. Pendahuluan

Program peningkatan kapabilitas APIP merupakan satu aksi berkelanjutan dan mencakup beberapa tahapan di dalamnya. Salah satu dan yang pertama di dalam tahapan tersebut adalah dilakukannya langkah penilaian kapabilitas untuk mengetahui tingkat kapabilitasnya pada saat penilaian dilakukan. Penilaian tersebut harus dilakukan secara mandiri (*Self Assessment*). Sebagaimana diketahui kerangka pikir (*logical framework*) penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan di Indonesia pada dasarnya mengacu pada *Internal Audit Capability Model (IACM)* yang dikembangkan oleh *The Insititute of Internal Auditor (IIA)*. Memperhatikan kerangka pikir penilaian tersebut maka perangkat penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan di Indonesia telah dilakukan penyesuaian sehingga akan lebih mudah dipahami dalam pelaksanaannya.



Semua (enam) elemen kapabilitas APIP yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola dinilai dengan menggunakan pemenuhan pernyataan (240 pernyataan) yang dikembangkan untuk seluruh KPA (41 KPA). Berdasarkan hasil penilaian tersebut akan diperoleh simpulan umum kapabilitas APIP, yang dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Secara konseptual, masing-masing tingkatan kapabilitas tersebut dapat dipahami dengan makna sebagai berikut:

Level 1 disebut *Initial*

Jika satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kapabilitas yang dimiliki baru mencapai level 1 maka di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya belum atau tidak ada praktik pengawasan yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan masih tergantung kepada kinerja individu auditor yang dimiliki sehingga **APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi.**

Level 2 disebut *Infrastructure*

Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kapabilitas yang dimiliki mencapai level 2 hal ini menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, dengan *outcome mampu*

**memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi.**

Level 3 disebut *Integrated*

Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kabilitas yang dimiliki mencapai level 3 hal ini menunjukkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan **outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.**

Level 4 disebut *Managed*

Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kabilitas yang dimiliki mencapai level 4 hal ini menunjukkan bahwa Unit audit internal telah mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko dengan **outcome APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.**

Level 5 disebut *Optimizing*

Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kabilitas yang dimiliki mencapai level 5 hal ini menunjukkan bahwa Unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan, dengan **outcome APIP menjadi agen perubahan.**

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP. Enam elemen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran dan Layanan (*Services and Role*)

Peran dan layanan APIP mencakup peran dan layanan yang dapat diberikan APIP kepada stakeholder eksternal secara berulang dan berkelanjutan. Berdasarkan perannya kegiatan APIP dapat dikelompokkan kedalam dua yaitu peran sebagai penjaminan (*assurance*) dan perannya sebagai konsultan (*consulting*) atau pemberi saran (*advisory services*). Sedangkan berdasarkan layanan yang dapat diberikan APIP untuk kegiatan assurance mencakup kegiatan audit, evaluasi, reviu dan monitoring dan untuk layanan terkait kegiatan konsultansi atau pemberian saran perbaikan mencakup kegiatan pemberian bimbingan teknis, pelatihan, dan masukan/saran sesuai dengan keahlian APIP dibidang pengendalian intern tanpa mengambil alih tugas dan tanggung jawab manajemen.

Penilaian terhadap jasa dan layanan yang dapat diberikan APIP kepada stakeholder difokuskan pada jenis, kualitas dan jumlah layanan yang dapat diberikan APIP kepada stakeholdernya sebagaimana tergambar dalam ciri-ciri setiap level kapabilitas pada IACM. Setiap level kapabilitas pada elemen peran dan layanan memberikan gambaran minimal kemampuan yang harus dimiliki APIP. Semakin tinggi level APIP semakin canggih dan banyak jenis serta cakupan layanan yang diberikan oleh APIP sesuai

dengan peran yang dijalankannya. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kecukupan jumlah dan kemampuan atau kompetensi SDM pengawasan APIP dalam memberikan layanan secara berulang dan berkelanjutan.

Peran dan layanan yang diberikan APIP untuk dapat melakukan penilaian yang independen dan obyektif dalam rangka memberi nilai tambah bagi organisasi K/L/Pemda sangat tergantung kepada kewenangan yang diterima APIP dan komitmen pimpinan organisasi yang terlihat pada isi dokumen *internal audit charter*.

Peran APIP adalah memberikan penilaian yang independen dan obyektif dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan memperbaiki operasi dan mengembangkan manajemen ke arah yang lebih baik. APIP dapat menjadi contoh (*role model*) bagi perubahan ke arah yang lebih baik.

Jenis Layanan yang diberikan APIP pada umumnya didasarkan pada kebutuhan organisasi, kewenangan, ruang lingkup, dan kapasitas APIP. Layanan mencakup kegiatan pemberian jasa penjaminan (*assurance*) dan pemberian saran (*advisory services*). Layanan penjaminan (*assurance*) dapat terdiri dari audit, reviu, dan evaluasi dimana kegiatan audit antara lain dapat berupa audit atas transaksi, kepatuhan, kinerja, dan *value for money audit*. Sedangkan kegiatan pemberian saran (*advisory services*) mencakup kegiatan pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian (*control self assessment*), dan pemberian nasihat lain.

Pendekatan dan cara pemberian layanan oleh APIP bervariasi tergantung dari kewenangan dan lingkungan APIP tersebut. Dalam memberikan layanan pengawasan, APIP dapat melaksanakan sendiri atau melakukan bersama-sama dengan pihak eksternal (*co-source*) atau dapat pula menyerahkan sepenuhnya kepada pihak eksternal (*outsource*).

Area yang menjadi lingkup layanan APIP mencakup layanan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/Pemda. Fokus layanan dapat berupa audit atas transaksi, kepatuhan, sistem, proses, prosedur, kinerja, efisiensi, ekonomis dan efektivitas, dan laporan keuangan.

## 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (*People Management*)

Penilaian pada elemen manajemen SDM mencakup penilaian pada bagaimana proses untuk menciptakan lingkungan kerja APIP yang memungkinkan SDM APIP berkinerja sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Lingkup pengelolaan SDM yang dinilai mencakup uraian pekerjaan/jabatan, perekrutan SDM, standar kinerja, pengembangan profesi, pelatihan, pemberian bimbingan kerja, dan pengembangan karir SDM.

Semakin tinggi level kapabilitas APIP semakin baik pengelolaan SDMnya yang terlihat dari adanya proses dan praktik yang baik mulai dari proses perekrutan, penempatan dan proses lainnya sampai dengan perencanaan pengembangan SDM pengawasan APIP kedepan sebagaimana uraian berikut.

Manajemen SDM merupakan suatu proses mulai dari merekrut, menempatkan, mengembangkan kompetensi dan karier SDM, memberikan insentif, sampai dengan

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang memungkinkan pegawai untuk memberikan kemampuan terbaik mereka secara optimal, yang mencakup:

a. Keberadaan uraian pekerjaan (*job description*)

Penyusunan dan pengembangan uraian pekerjaan yang jelas merupakan hal penting agar SDM APIP mengetahui apa yang harus dikerjakannya sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai.

b. Perekrutan pegawai

Perekrutan pegawai yang kompeten dan tepat diperoleh melalui proses seleksi yang tepat dengan memperhatikan persyaratan jabatan dan tujuan pekerjaan yang diperlukan.

c. Pengembangan profesi pegawai

Pengembangan pegawai mencakup kegiatan pemberian kesempatan untuk meningkatkan pendidikan, keahlian profesi melalui pelatihan yang berkelanjutan, pembinaan pegawai dan pemberian masukan yang terus menerus.

d. Penilaian dan penentuan standar kinerja

Penilaian kinerja dilakukan dengan mengacu kepada standar, hasil, dan ukuran kinerja yang telah ditentukan.

e. Pemberian penghargaan (*reward*)

Pemberian penghargaan kepada pegawai dilakukan dengan mendisain sistem penghargaan dan imbalan yang efektif, memberikan kesempatan promosi dan pengembangan karier, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

f. Perencanaan SDM jangka panjang

Mencakup perencanaan SDM agar dapat melaksanakan kegiatan pengawasan yang direncanakan akan dilaksanakan di masa mendatang.

3. Praktik Profesional (*Professional Practices*)

Penilaian pada elemen praktik profesional mencakup penilaian terhadap kapasitas APIP yang mencakup kebijakan, proses, dan praktik-praktik yang memungkinkan APIP bekerja secara efektif dengan melihat keselarasan antara kebijakan, proses dan praktik-praktik APIP dengan prioritas dan strategi pengelolaan risiko dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dimana APIP itu berada.

Penilaian terhadap elemen praktik professional juga mencakup penilaian terhadap kontribusi APIP dalam melakukan pengembangan yang berkelanjutan pada APIP dan organisasi dimana APIP itu berada serta upaya APIP dalam mengembangkan dan menjaga penjaminan kualitas dan program perbaikan yang mencakup seluruh aspek kegiatan APIP dalam rangka meyakinkan bahwa APIP telah bekerja sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Menunjukkan gambaran secara lengkap mengenai kebijakan, proses, dan praktik yang menjamin pemeliharaan kualitas kerja APIP agar kegiatan APIP dilaksanakan secara efektif dengan kemampuan dan kecermatan profesi sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

- a. Pengembangan dan pemeliharaan kualitas kerja.  
Pengembangan dan pemeliharaan kualitas kerja dilakukan melalui program pengembangan profesi seperti mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan yang diselenggarakan organisasi profesi yang relevan.
  - b. Dukungan atas keikutsertaan dalam organisasi profesi yang relevan.  
Mencakup dukungan bagi pimpinan dan staf auditor APIP untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan profesi yang diselenggarakan organisasi profesi dan dorongan serta insentif untuk menjadi pengurus pada organisasi profesi yang relevan.
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)  
Hal yang dinilai pada elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja adalah kegiatan dan upaya APIP dalam menyediakan informasi kinerja yang dibutuhkan baik informasi kinerja keuangan maupun non keuangan dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasional APIP dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP. Informasi Kinerja  
Mencakup kegiatan penyediaan informasi kinerja yang dibutuhkan baik keuangan maupun nonkeuangan dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasional APIP dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP.
- a. Informasi Kinerja  
Mencakup informasi kinerja yang cukup dan relevan yang memungkinkan APIP melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari perencanaan kinerja sampai pemenuhan indikator kinerja.
  - b. Pengelolaan sistem informasi kinerja.  
Pengelolaan sistem informasi kinerja mencakup informasi yang relevan dengan pengukuran kinerja yang terdiri dari informasi keuangan maupun nonkeuangan.
  - c. Pelaporan kinerja  
Pelaporan mencakup pelaporan tentang kinerja dan efektivitas dari pelaksanaan kegiatan APIP baik pelaporan kepada pimpinan organisasi K/L/Pemda dan para pemangku kepentingan utama maupun kepada masyarakat.
5. Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)  
Tujuan dari penilaian elemen budaya dan hubungan organisasi adalah untuk meyakinkan bahwa budaya dan hubungan internal APIP dalam organisasi sebagaimana terlihat pada struktur organisasi dan manajemen internal. Selain itu hal lain yang akan dinilai pada elemen ini adalah hubungan APIP dengan pimpinan unit lain baik pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dimana APIP tersebut berada telah terjalin dengan baik.

Mencakup budaya dan hubungan internal organisasi serta lingkungan APIP, dan bagaimana budaya dan hubungan organisasi tersebut memberikan dampak terhadap para pemangku kepentingan utama dan pihak lain di luar organisasi.

a. Budaya dan Hubungan internal APIP dalam organisasi

Budaya dan hubungan organisasi internal APIP mencakup hubungan manajemen internal dalam APIP, hubungan dengan pimpinan APIP, dan hubungan dengan jajaran pimpinan organisasi K/L/Pemda.

b. Budaya dan hubungan APIP dengan pihak lain

Budaya dan hubungan APIP dengan unit lain mencakup hubungan APIP dengan para pemangku kepentingan utama dan auditor eksternal atau dengan organisasi pengawasan lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Struktur Tata Kelola (*Governance Structures*)

Struktur tata kelola mengacu pada kombinasi antara kebijakan dan proses serta struktur yang diterapkan pada APIP dalam rangka menginformasikan, mengatur, mengelola dan memantau kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah guna meyakinkan bahwa tujuan organisasi terhadap pencapaian tujuan.

Penilaian terhadap struktur tata kelola APIP bertujuan untuk menilai apakah APIP telah memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk memberikan otoritas yang diperlukan, dukungan, dan sumber daya untuk pelaksanaan pengawasan intern, serta hubungan pelaporan secara administratif dan fungsional sebagai sarana terjaminnya independensi dan obyektivitas APIP. Fokus penilaian elemen ini adalah pada upaya/usaha yang telah dilakukan manajemen APIP dalam melakukan kegiatannya dan hubungan dalam organisasi APIP seperti struktur organisasi, manajemen SDM, penyusunan dan monitoring anggaran, rencana tahunan, penyediaan sarana dan teknologi pengawasan serta pelaksanaan pengawasan.

Hubungan pelaporan mencakup hubungan pimpinan APIP dengan jajaran pimpinan dalam organisasi K/L/Pemda dan pihak lain di luar organisasi, ketersediaan sarana prasarana, dan kebijakan organisasi yang mendukung terciptanya keselarasan kegiatan APIP dengan struktur tata kelola organisasi K/L/pemda secara keseluruhan.

a. Hubungan pelaporan

Mencakup hubungan pelaporan pimpinan APIP baik secara administratif (keuangan) maupun fungsional (kegiatan pengawasan) kepada pimpinan organisasi K/L/Pemda yang memungkinkan APIP melaksanakan tanggung jawabnya.

b. Ketersediaan sarana untuk menjamin independensi dan obyektivitas APIP

Keberadaan *internal audit charter* yang memberikan kewenangan bagi APIP untuk dapat mengakses penuh informasi, catatan, aset, dan personil organisasi agar dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh.

c. Dukungan kebijakan organisasi K/L/Pemda



Mencakup ketersediaan kebijakan dan prosedur organisasi yang dibangun untuk mendukung kecukupan sumber daya APIP, penganggaran, dan pengawasannya terhadap APIP yang dapat memberikan kontribusi bagi efektivitas dan independensi APIP.

## **B. Organisasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri**

Ukuran organisasi, dilihat dari unsur SDM, unit APIP di Indonesia sangat beragam. Terdapat unit APIP yang memiliki jumlah tenaga auditor yang sangat besar misalnya BPKP yang memiliki tenaga SDM auditor sekitar 4.000-an. Tetapi di sisi lain banyak juga unit APIP yang memiliki tenaga SDM auditor dalam jumlah yang terbatas, misalnya hanya 5 orang. Memperhatikan kondisi jumlah SDM yang demikian beragam maka pengorganisasian pelaksanaan penilaian kapabilitas APIP diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing unit APIP untuk mempertimbangkan apakah perlu membentuk satuan tugas atau tim kerja tersendiri atau melaksanakannya sebagai bagian dari tugas rutin organisasi.

Apabila kondisi APIP memungkinkan, dengan membentuk satuan tugas tersendiri pelaksanaan penilaian mandiri akan membuat langkah-langkah peningkatan kapabilitas APIP berjalan dengan efektif. Manfaat yang diperoleh apabila dalam pelaksanaan dibentuk satuan tugas, antara lain:

1. Sebagai tim yang berperan untuk memenuhi pernyataan dalam isian penilaian kapabilitas APIP;
2. Sebagai pihak yang berperan menjadi mitra bagi Tim Validasi dalam rangka penjaminan kualitas, jika pasca penilaian mandiri, BPKP melakukan penjaminan kualitas dan validasi atas hasil penilaian mandiri tersebut;
3. Sebagai pihak yang berperan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan sekaligus merumuskan rencana tindak perbaikan atau peningkatan yang diperlukan;
4. Sebagai pihak yang berperan mengoordinasikan peningkatan kapabilitas APIP di unit APIP yang bersangkutan.

### C. Jenis Penilaian

Penilaian kapabilitas unit APIP merupakan proses yang berkelanjutan (*continuous*) mengingat kondisi kapabilitas itu sendiri bersifat dinamis sepanjang waktu. Tingkat kapabilitas yang telah dicapai pada satu waktu pada dasarnya dapat mengalami perubahan : meningkat, menurun atau tidak mengalami perubahan/tetap pada waktu berikutnya.

Pelaksanaan penilaian kapabilitas APIP dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Initial Assessment* (Penilaian Pertama)

Ini merupakan kegiatan penilaian kapabilitas yang pertama kali dilakukan pada satu unit APIP tertentu. Hasil penilaian yang diperoleh dari kegiatan *Initial Assessment* merupakan titik awal atau dasar (*baseline*) dalam program peningkatan kapabilitas APIP tersebut.

2. *Repeat Assessment* (Penilaian Berulang)

Ini merupakan kegiatan penilaian kapabilitas yang dilakukan pasca pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian *Initial Assessment* atau *Repeat Assessment* sebelumnya. *Repeat Assessment* pertama kali dilakukan pasca penilaian *Initial Assessment* dan dengan kata lain seluruh *Assessment* yang dilakukan pasca *Initial Assessment* adalah merupakan *Repeat Assessment*.

Kegiatan *Repeat Assessment* diperlukan untuk mengetahui apakah pasca pelaksanaan perbaikan atau peningkatan terhadap seluruh area yang perlu diperbaiki terjadi peningkatan level kapabilitas APIP tersebut. Apabila pelaksanaan perbaikan atau peningkatan terhadap seluruh area yang perlu diperbaiki yang diidentifikasi berdasarkan penilaian sebelumnya (*Initial Assessment* atau *Repeat Assessment*) belum tuntas pelaksanaannya maka *Repeat Assessment* tidak perlu dilakukan.

### D. Sarana – Media Penilaian

Wilayah geografis Indonesia sangat luas, membentang dari Kota Sabang sampai Kota Merauke, dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kondisi ini merupakan faktor yang dapat menghambat kelancaran arus informasi dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan. Memperhatikan kondisi tersebut, untuk memudahkan pelaksanaan penilaian, penyampaian informasi dan pelaksanaan pemantauan program peningkatan kapabilitas APIP secara nasional maka telah dikembangkan infrastruktur teknologi informasi berbasis internet. Dengan keberadaan infrastruktur ini diharapkan program peningkatan kapabilitas APIP dapat berjalan lebih baik dan lebih lancar.

Sehubungan dengan itu, kegiatan penilaian kapabilitas ini dirancang terutama dilakukan dengan menggunakan infrastruktur teknologi informasi berbasis internet tersebut sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara *Online*. Setiap unit APIP akan memperoleh hak akses ke dalam jaringan sehingga proses terkait dengan program

peningkatan kapabilitas dapat dilakukan melalui media aplikasi tersebut. Untuk memperoleh hak akses dimaksud, setiap unit APIP diminta untuk menghubungi BPKP.

Dalam kondisi dimana unit APIP tertentu tidak dapat mengakses aplikasi karena keterbatasan atau gangguan jaringan atau faktor lainnya maka penilaian kapabilitas dan hal lainnya dapat dilakukan secara *manual*. Namun demikian alternatif ini bukanlah prosedur yang direkomendasikan karena akan mengganggu kelancaran pelaksanaan penilaian, penyampaian informasi dan pelaksanaan pemantauan program peningkatan kapabilitas APIP secara nasional.

#### **E. Ruang Lingkup Penilaian**

Secara konseptual penilaian kapabilitas APIP bersifat komprehensif artinya aspek yang dinilai tidak terbatas pada faktor input, proses dan sistem, *output* tetapi meliputi aspek manfaat.

Mengingat luasnya aspek penilaian tersebut maka dalam pelaksanaan penilaian kapabilitas APIP secara mandiri ini akan dibatasi pada penilaian aspek-aspek yang keberadaannya atau ketersediaan dokumen atau bukti pendukungnya terbatas di lingkungan internal unit APIP itu sendiri. Hal ini biasanya terkait dengan faktor input, proses dan sistem, serta *output*.

Sementara itu hal yang terkait dengan informasi yang harus diperoleh dari pihak eksternal tidak menjadi bagian yang diwajibkan dari penilaian mandiri ini. Pengumpulan informasi yang bersumber dari pihak eksternal terkait dengan faktor input, proses dan sistem, serta *output* akan diperoleh pada saat kegiatan penjaminan kualitas dilakukan oleh BPKP.

#### **F. Cara Penilaian**

Sebelum penilaian kapabilitas ini dilaksanakan maka (tim) penilai diasumsikan telah memiliki pemahaman yang baik tentang kerangka pikir model kapabilitas APIP untuk mendapatkan pemahaman kerangka pikir dimaksud, pembaca dapat melihat pedoman yang diterbitkan dengan peraturan Kepala BPKP no. 1633...dst. Dengan memiliki pemahaman yang demikian maka diharapkan akan lebih mudah memahami makna dan maksud 240 pernyataan yang dirancang dalam penilaian kapabilitas ini. Untuk mendapatkan pemahaman dimaksud unit APIP dapat melakukannya dengan mempelajari buku atau pedoman terkait, melakukan konsultasi atau mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang telah dikembangkan oleh BPKP.

Pelaksanaan penilaian kapabilitas dipengaruhi oleh jenis penilaian yang dilakukan, yaitu apakah termasuk *Initial Assessment* atau *Repeat Assessment*. Jenis penilaian ini akan mempengaruhi jumlah pernyataan yang perlu dipenuhi. Jika penilaian merupakan *Initial Assessment* maka seluruh pernyataan (240 pernyataan) harus dijawab. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kapabilitas unit APIP terkait. Unit APIP tidak dapat memilih atau membatasi diri hanya

menjawab sampai level tertentu saja. Selanjutnya apabila penilaian merupakan *Repeat Assessment* maka jumlah pernyataan yang perlu dijawab terbatas pada pernyataan untuk level kapabilitas yang ingin dicapai berdasarkan *Initial Assessment* atau *Repeat Assessment* sebelumnya. Misalnya:

- apabila berdasarkan *Initial Assessment* diperoleh simpulan bahwa level kapabilitas adalah 1 maka selanjutnya level kapabilitas yang akan dicapai adalah level 2.
- apabila berdasarkan *Repeat Assessment* diperoleh simpulan bahwa level kapabilitas adalah 2 Dengan Catatan maka level kapabilitas selanjutnya yang akan dicapai adalah level 3.

Berikut ini merupakan tata cara penilaian kapabilitas sesuai dengan jenis penilaian yang dilakukan:

#### 1. *Initial Assessment* (Penilaian Pertama)

Secara teknis penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi pemenuhan indikator untuk setiap pernyataan yang tersedia. Seluruh pernyataan (240 pernyataan) harus dijawab dengan menyediakan bukti atau dokumen yang relevan.

Di dalam pemenuhan pernyataan tersebut, prinsip dasar yang harus dipahami oleh semua pihak terkait adalah jangan menjadikan 'level kapabilitas' sebagai target yang ingin dicapai (*Orientasi Output-Level*) melainkan target yang ingin dicapai adalah bagaimana membuat agar kapabilitas APIP tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga APIP mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam pengawalan kegiatan organisasi dimana APIP itu berada (*Orientasi Outcome-Manfaat*). Perbedaan kedua hal tersebut akan berdampak pada motivasi kita dalam memberikan jawaban pemenuhan. Jika kita berorientasi pencapaian 'level' maka akan ada kecenderungan untuk menjawab terpenuhinya sebanyak mungkin pernyataan yang ada tanpa didukung dengan bukti atau fakta yang memadai dan kuat. Fenomena seperti ini akan kurang kondusif karena kondisi nyata APIP di dalam melaksanakan tugasnya sebagai 'tangan' pimpinan organisasi tidak akan sesuai dengan level kapabilitas yang diperoleh melalui penilaian.

##### a. Jumlah Pernyataan

*Initial Assessment* merupakan langkah awal dan pertama kali dalam proses penilaian kapabilitas APIP. Artinya kita belum pernah mengetahui kapabilitas APIP sebelum *Initial Assessment* tersebut dilaksanakan. Memperhatikan kondisi tersebut untuk dapat mengetahui kondisi kapabilitas sesungguhnya maka penilaian pertama kali ini harus dilakukan dengan mengidentifikasi pemenuhan indikator untuk seluruh pernyataan yang ada yaitu 240 pernyataan. Dengan dilakukannya penilaian yang komprehensif maka kondisi awal atau dasar (*baseline*) akan dapat diketahui. Kondisi ini akan menjadi dasar penyusunan program peningkatan kapabilitas APIP terkait di masa yang akan datang. Rincian 240 pernyataan pengukuran kapabilitas APIP yang komprehensif dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 1  
Jumlah dan Nomor Pernyataan Penilaian Kapabilitas APIP

	PERNYATAAN								JUMLAH TOTAL
	LEVEL 2		LEVEL 3		LEVEL 4		LEVEL 5		
	JUMLAH	NOMOR	JUMLAH	NOMOR	JUMLAH	NOMOR	JUMLAH	NOMOR	
ELEMEN I	9	1-9	10	10-19	5	20-24	6	25-30	30
ELEMEN II	12	1-12	20	13-32	14	33-46	9	47-55	55
ELEMEN III	13	1-13	17	14-30	4	31-34	9	35-43	43
ELEMEN IV	10	1-10	19	11-29	9	30-38	5	39-43	43
ELEMEN V	6	1-6	14	7-20	7	21-27	8	28-35	35
ELEMEN VI	8	1-8	13	9-21	8	22-29	5	30-34	34
	58		93		47		42		240

Keterangan:

- Elemen I adalah Peran dan Layanan APIP
- Elemen II adalah Pengelolaan SDM
- Elemen III adalah Praktik Profesional
- Elemen IV adalah Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
- Elemen V adalah Budaya dan Hubungan Organisasi
- Elemen VI adalah Struktur Tata Kelola

Selain itu, setiap unit APIP juga harus menyampaikan data atau informasi umum. Informasi yang perlu disampaikan antara lain mencakup cakupan pengawasan (*coverage*), perbandingan antara jumlah anggaran pengawasan dengan jumlah anggaran organisasi dimana unit APIP tersebut berada, alokasi anggaran setiap jenis pengawasan, jumlah SDM, pendidikan dan keahlian yang dimiliki tenaga auditor. Rincian data umum yang diperlukan dapat dilihat pada Lampiran 1.

Informasi umum ini sangat diperlukan dalam rangka mendapatkan gambaran umum kondisi pengawasan APIP secara nasional dan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan manajemen pengawasan intern Pemerintah.

Mengingat data/informasi umum ini kondisinya bersifat dinamis dan fluktuatif maka proses pemutakhiran (*updating*) datanya harus dilakukan minimal setiap enam bulan.

b. Jawaban Pemenuhan Pernyataan

Proses penilaian kapabilitas dilakukan dengan cara mengidentifikasi pemenuhan indikator untuk setiap pernyataan. Untuk memudahkan cara mengidentifikasi pemenuhan dimaksud, pada Lampiran 2 tersebut telah diuraikan “Indikator yang Harus Dipenuhi” dan “Contoh Infrastruktur yang diperlukan” untuk masing-masing pernyataan. Kemungkinan jawaban pemenuhan setiap pernyataan adalah jawaban “ya”, “sebagian”, atau “tidak”, sesuai dengan kondisi yang ada di unit APIP yang bersangkutan. Contoh Kertas Kerja penilaian kapabilitas APIP seperti pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2

Contoh Kertas Kerja Penilaian Kapabilitas APIP

No.	Uraian/Pernyataan	Indikator yang Harus Dipenuhi	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
				Ya	Sebagian	Tidak
<b>LEVEL 2</b>						
1	Kami telah melakukan kegiatan pengawasan berupa audit atas transaksi dan/atau dokumen tertentu untuk menilai akurasi perhitungan.	Auditor sudah melaksanakan prosedur audit standar untuk menilai akurasi perhitungan (seperti <i>vouching</i> , <i>tracing</i> ).	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit			
2	Kegiatan pengawasan yang kami lakukan bersifat audit kepatuhan ( <i>compliance auditing</i> ).	PKPT/PKAT berisi rencana audit untuk menguji kepatuhan antara kondisi dengan kriteria yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>,</li> <li>• <i>Audit Universe</i> (Peta Auditan), dan</li> <li>• SOP penyusunan PKPT</li> </ul>			

Menentukan jawaban atas masing-masing pernyataan perlu kehati-hatian dan keberadaan bukti/dokumen pendukung maupun sistem yang sudah berjalan di lingkungan APIP. Dalam menentukan salah satu alternatif pilihan “ya”, “sebagian”, “tidak”, harus didasarkan pada dokumen yang ada di unit APIP yang bersangkutan dan sudah diimplementasikan secara terus menerus, minimal (namun tidak terbatas) sesuai dengan contoh infrastruktur yang ada di dalam Lampiran 2.

Dalam memilih ketiga jawaban tersebut, tidak hanya mendasarkan pada prosentase (banyaknya) kepemilikan dokumen seperti yang tercantum dalam Lampiran 2, namun mendasarkan pada pertimbangan profesional dari unit APIP tersebut.

- 1) Jawaban “ya” dipilih dengan asumsi bahwa unit APIP mempunyai dokumen minimal (namun tidak terbatas) seperti dalam contoh infrastruktur pada Lampiran 2, dan dengan kondisi bahwa unit APIP yang bersangkutan telah mengimplementasikan seluruhnya secara terus menerus dan berulang-ulang.
- 2) Jawaban “sebagian” dipilih dengan asumsi bahwa unit APIP hanya mempunyai dokumen yang lebih sedikit dibandingkan dengan contoh infrastruktur pada Lampiran 2, dan dengan kondisi bahwa unit APIP yang bersangkutan hanya sebagian besar mengimplementasikan dokumen tersebut secara tidak terus menerus dan tidak berulang-ulang.
- 3) Jawaban “tidak” dipilih dengan asumsi jika unit APIP yang bersangkutan tidak mempunyai dokumen (namun tidak terbatas) seperti dalam Lampiran 2, sehingga tidak ada yang diimplementasikan di unit APIP tersebut.

Penilaian kapabilitas harus dilakukan secara berurutan, seperti disajikan pada Lampiran 2, dimulai dari pernyataan pertama sampai dengan pernyataan terakhir pada masing-masing elemen kapabilitas APIP.

Setiap jawaban “ya” dan “sebagian” harus didukung dengan bukti dokumen maupun sistem yang sudah ada dan berjalan (dilaksanakan). Semua bukti pendukung yang ada tersebut harus dikumpulkan dalam kertas kerja pendukung tersendiri.

Penyajian jawaban di dalam aplikasi kapabilitas APIP (jika media penilaian dilakukan secara *Online*) atau formulir Kertas Kerja Penilaian Kapabilitas APIP (jika media penilaian dilakukan secara *Manual*) dilakukan dengan ketentuan :

- 1) Apabila jawaban pemenuhan adalah “Ya” maka disajikan dengan diberi nilai 1 (satu);
- 2) Apabila jawaban pemenuhan adalah “Sebagian” maka disajikan dengan diberi nilai 0,5 (setengah),
- 3) Apabila jawaban pemenuhan adalah “Tidak” maka disajikan dengan diberi nilai bernilai 0 (nol).

c. Simpulan Hasil Jawaban Pemenuhan Pernyataan

Setelah seluruh 240 pernyataan diselesaikan penilaiannya maka langkah berikutnya adalah menarik simpulan umum hasil penilaian. Simpulan dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

1) Simpulan Setiap Elemen Kapabilitas

Simpulan pertama dilakukan pada setiap level untuk masing-masing enam elemen kapabilitas APIP. Seluruh jawaban “Ya” yang telah dikonversi dengan nilai “1” dan jawaban “Sebagian” yang telah dikonversi dengan nilai “0,5” dijumlahkan. Dengan pola penyimpulan demikian maka untuk masing-masing elemen akan terdapat lima simpulan, yaitu simpulan elemen 1 untuk masing-

masing level kapabilitas. Secara keseluruhan akan diperoleh sebanyak 24 simpulan untuk enam elemen kapabilitas (6 elemen @ 4 level).

Penyimpulan level pada setiap elemen kapabilitas dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai jawaban yang diperoleh dimana untuk setiap elemen jumlah jawaban maksimal akan sesuai dengan jumlah pernyataan untuk setiap level pada masing-masing elemennya (lihat Tabel 1), misalnya: Untuk Elemen I Peran dan Layanan, jumlah pernyataan untuk Level 2 ada 9 pernyataan yaitu dari nomor 1 sampai dengan 9, untuk Level 3 ada 10 pernyataan yaitu dari nomor 10 sampai dengan 19, dan seterusnya. Maka, jika pernyataan nomor 1 sampai dengan 9, dijawab “ya” semuanya maka jumlah nilainya adalah 9 sehingga capaian level untuk Elemen I Peran dan Layanan adalah Level 2. Namun, jika dari 9 pernyataan tersebut ada satu atau lebih yang dijawab “sebagian” atau “tidak”, maka nilainya menjadi kurang dari 9, sehingga untuk Elemen I Peran dan Layanan capaiannya baru di Level 1. Demikian seterusnya untuk setiap level pada setiap elemen.

Apabila penilaian dilakukan secara *Online* maka mekanisme penarikan simpulan tersebut akan dilakukan secara otomatis di dalam Aplikasi Kapabilitas APIP. Tetapi apabila penilaian dilakukan secara *Manual* maka penarikan simpulan tersebut harus dilakukan oleh pihak yang melakukan penilaian kapabilitas itu sendiri.

## 2) Simpulan Umum Seluruh Elemen Kapabilitas

Setelah penarikan simpulan “level” pada masing-masing elemen kapabilitas dilakukan maka akan diperoleh gambaran kondisi “level” kapabilitas secara umum namun belum memberikan gambaran “level” kapabilitas organisasi APIP yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena adanya kemungkinan masing-masing elemen kapabilitas berada pada level kapabilitas yang tidak sama atau berbeda. Dalam kondisi demikian maka diperlukan satu kriteria penarikan simpulan umum untuk semua elemen kapabilitas sehingga diperoleh informasi tingkat/level kapabilitas organisasi APIP.

Penarikan simpulan umum kapabilitas APIP, baik terhadap penilaian kapabilitas yang dilakukan secara *Online* maupun secara *Manual*, akan dilakukan oleh BPKP. Unit APIP yang melakukan penilaian kapabilitas APIP hanya bertanggung jawab untuk menarik simpulan untuk masing-masing elemen kapabilitas APIP. Tata cara penarikan simpulan penilaian kapabilitas satu organisasi APIP dapat dilihat pada Pedoman Teknis Penjaminan Kualitas Penilaian Kapabilitas APIP (Buku 2).

## d. Pelaporan Hasil Penilaian

Hasil penilaian kapabilitas APIP, baik penilaian kapabilitas yang dilakukan secara *Online* maupun secara *Manual*, wajib dilaporkan oleh pimpinan Unit APIP kepada



Pimpinan Kementerian/Lembaga atau Kepala Daerah, dengan ditembuskan kepada Deputi BPKP/ Perwakilan BPKP yang menjadi mitra kerjanya.

Contoh laporan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3 pedoman ini. Laporan tersebut harus dilampiri dengan kertas kerja penilaian kapabilitas APIP, sesuai dengan Lampiran 1.

## 2. *Repeat Assessment* (Penilaian Berulang)

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, apabila pelaksanaan perbaikan atau peningkatan terhadap seluruh area yang perlu diperbaiki yang diidentifikasi berdasarkan penilaian sebelumnya (*Initial Assessment* atau *Repeat Assessment*) telah tuntas pelaksanaannya maka perlu dilakukan penilaian kembali untuk meyakinkan bahwa seluruh KPA dan pernyataan yang terkait telah terpenuhi sehingga dapat diyakinkan bahwa unit APIP telah mencapai kapabilitas tertentu.

Kegiatan *Repeat Assessment* diperlukan untuk mengetahui apakah pasca pelaksanaan perbaikan atau peningkatan seluruh area yang perlu diperbaiki telah atau belum terjadi peningkatan level kapabilitas APIP. Apabila pelaksanaan perbaikan atau peningkatan seluruh area yang perlu diperbaiki yang diidentifikasi berdasarkan penilaian sebelumnya (*Initial Assessment* atau *Repeat Assessment*) belum tuntas pelaksanaannya maka *Repeat Assessment* tidak perlu dilakukan.

Mengingat *Repeat Assessment* merupakan prosedur untuk meyakini pencapaian target satu level kapabilitas tertentu maka pernyataan yang perlu dinilai kembali hanya dilakukan secara terbatas saja (tidak seluruh 240 pernyataan sebagaimana dilakukan pada *Initial Assessment*) yaitu pernyataan yang relevan dengan tingkat/level kapabilitas yang ingin dicapai. Misalnya apabila berdasarkan penilaian *Initial Assessment* diperoleh simpulan kapabilitas APIP berada pada Level 2 Dengan Catatan maka tingkat/level kapabilitas yang ingin dicapai adalah Level 2.

Perbedaan utama antara *Initial Assessment* dengan *Repeat Assessment* terutama terletak pada jumlah pernyataan yang perlu dinilai. Proses lainnya secara umum adalah sama.

## G. Penjaminan Kualitas Penilaian

Mengingat penilaian kapabilitas APIP dilakukan dengan cara mandiri maka untuk meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh perlu dilakukan proses penjaminan untuk meyakinkan hasil penilaian tersebut telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pimpinan APIP kepada BPKP, BPKP selanjutnya akan melakukan analisis lebih lanjut dan apabila berdasarkan analisis tersebut dipandang perlu melakukan validasi maka BPKP dapat melakukan penjaminan kualitas dengan cara menguji hasil penilaian tersebut melalui validasi dokumen dan data pendukung yang ada. Validasi yang dilakukan oleh BPKP tidak terbatas pada pengujian dokumen dan data pendukung lainnya yang disampaikan oleh unit APIP melainkan dapat ditambah dengan konfirmasi melalui wawancara kepada pihak eksternal yang terkait

dengan pelaksanaan tugas APIP tersebut. Keputusan apakah hasil penilaian kapabilitas oleh unit APIP tertentu akan divalidasi atau tidak sangat tergantung pada hasil analisis dan sumber daya yang dimiliki oleh BPKP. Mempertimbangkan jumlah unit APIP yang demikian banyak di seluruh Indonesia maka BPKP akan membuat kebijakan terkait dengan tata cara identifikasi dan penetapan hasil penilaian kapabilitas APIP yang perlu divalidasi kemudian.

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas penilaian kapabilitas APIP diatur di dalam Pedoman Teknis Penjaminan Kualitas Penilaian Kapabilitas APIP (Buku 2).

#### **H. Tindak Lanjut Hasil Penilaian**

Segera setelah hasil penilaian kapabilitas APIP diperoleh, baik melalui *Initial Assessment* atau *Repeat Assessment*, pimpinan unit APIP harus segera melakukan identifikasi KPA, pernyataan dan indikator/infrastruktur yang perlu perbaikan (*Area of Improvement*) secara terbatas yaitu pernyataan yang relevan dengan tingkat/level kapabilitas yang ingin dicapai saja. Pada hakekatnya *Area of Improvement* ini merupakan pernyataan-pernyataan yang dijawab dengan nilai 0,5 dan Nol. Pernyataan yang sudah dijawab dengan nilai 1 artinya seluruh indikator telah dipenuhi sehingga tidak diperlukan lagi upaya perbaikan/peningkatan.

Langkah ini merupakan tahap awal bentuk nyata upaya peningkatan kapabilitas APIP. Tanpa melakukan identifikasi dimaksud maka proses peningkatan kapabilitas APIP tidak dapat dilaksanakan.

Setelah proses identifikasi KPA, pernyataan dan indikator/infrastruktur yang perlu ditingkatkan/diperbaiki (*Area of Improvement*) dilakukan untuk tingkat/level kapabilitas yang ingin dicapai, langkah selanjutnya adalah merumuskan dan mengembangkan rencana tindak perbaikannya (*action plan*).

Setiap unit APIP harus mengembangkan “Rencana Tindak Induk” yang meliputi seluruh kegiatan yang diperlukan dalam rangka pencapaian tingkat/level kapabilitas yang ingin dicapai. “Rencana Tindak Induk” tersebut kemudian dapat dipecah/diturunkan menjadi lebih rinci ke dalam satuan waktu/periode yang lebih pendek misalnya per triwulan.

Pimpinan APIP harus dapat merancang rencana tindak yang terstruktur sehingga target kapabilitas APIP sebagaimana ditetapkan di dalam RPJMN 2015-2019 dapat dicapai.

### BAB III

#### PENUTUP

Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian mandiri (*self assessment*) tingkat kapabilitas APIP yang dilaksanakan oleh APIP itu sendiri, baik di lingkungan APIP Pusat pada Kementerian/Lembaga maupun APIP Daerah pada Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal-hal yang dicakup dalam Pedoman ini adalah acuan mendasar yang berlaku secara umum bagi organisasi pengawasan intern.

Simpulan hasil penilaian mandiri yang telah dicapai APIP baik yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi maupun manual, perlu dilakukan validasi/pejaminan mutu (*quality assurance*) oleh pihak eksternal unit APIP yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), baik BPKP Pusat maupun BPKP Perwakilan. Validasi/pejaminan mutu (*quality assurance*) dilakukan dengan mengacu kepada Pedoman Penjaminan Kualitas Kapabilitas APIP yang ada (buku 2). Berdasarkan hasil validasi tersebut, antara lain akan diketahui capaian level kapabilitas APIP yang sebenarnya, area yang memerlukan perbaikan yang harus dibangun, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki tingkat kapabilitas APIP.

Perumusan rencana tindak peningkatan harus dilakukan tanpa menunggu penjaminan kualitas oleh BPKP. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, unit APIP dapat melakukan sendiri peningkatan kapabilitas APIP dengan mendasarkan pada *area of improvement* yaitu berupa pernyataan-pernyataan yang jawabannya “sebagian” atau “tidak”. Perbaikan tersebut dapat berupa pemenuhan dokumen dan pelaksanaannya atau pun membentuk sistem dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern. Langkah-langkah perbaikan kapabilitas APIP berpedoman kepada Pedoman Teknis Peningkatan Mandiri Kapabilitas APIP (*Self Improvement*) yang ada (buku 3).

## DATA UMUM APIP

### I. CAKUPAN PENGAWASAN

No.	Uraian	Tahun sebelumnya	Tahun ini
1)	Berdasarkan unit kerja eselon I. II dan/atau eselon III mandiri dan dekonsentrasi		
	a. Jumlah unit kerja eselon I. II dan/atau eselon III mandiri di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemda		
	b. Jumlah unit kerja eselon I. II dan/atau eselon III mandiri yang menjadi obyek pengawasan		
<b>Persentase</b>			
2)	Berdasarkan nilai anggaran dalam APBN		
	a. Nilai anggaran dalam APBN (milyar rupiah)		
	b. Nilai anggaran dalam APBN yang menjadi obyek pengawasan (milyar rupiah)		
<b>Persentase</b>			

### II. ANGGARAN APIP

No.	Uraian	Tahun sebelumnya	Tahun ini
1)	Rata-rata persentase jumlah anggaran belanja APIP relatif		
	a. Jumlah anggaran Kementerian/Lembaga/Pemda (milyar rupiah)		
	b. Jumlah anggaran belanja APIP (milyar rupiah)		
<b>Persentase</b>			
2)	Rata-rata persentase jumlah anggaran belanja untuk kegiatan operasional pengawasan		
	a. Jumlah anggaran belanja (milyar rupiah)		
	b. Jumlah anggaran operasional pengawasan (milyar rupiah)		
<b>Persentase</b>			

### III. ANGGARAN PENGAWASAN APIP

No.	Uraian	Anggaran	
		%	Rp
a.	Audit		
b.	Evaluasi		
c.	Reviu		
d.	Monitoring/Pemantauan		
e.	BimbinganTeknis/Asistensi/ Sosialisasi		
f.	Penilaianterhadap:		
	- Tata Kelola ( <i>governance</i> )		
	- ManajemenRisiko ( <i>risk management</i> )		
	- PengendalianOrganisasi ( <i>control</i> )		
g.	Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi		
h.	KegiatanPenegakanDisiplinPNS		
i.	Pembinaan SDM Pengawasan (al : Pelatihan di Kantor Sendiri ( <i>in house training</i> . diklat. seminar)		
j.	KegiatanPengawasanLainnya		
<b>Jumlah</b>			

### IV. JUMLAH SDM APIP

No.	Jumlah SDM APIP	Kondisi saat ini	Jumlah Ideal Sesuai Kebutuhan
<b>1)</b>	<b>SDM Pengawasan</b>		
a.	Jabatan Struktural		
b.	Jabatan Fungsional Auditor		
c.	Jabatan Fungsional Tertentu		
d.	Pegawai Pelaksana Pengawasan bukan Auditor		
<b>2)</b>	<b>SDM Penunjang (ketatausahaan)</b>		
a.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer		
b.	Jabatan Fungsional Umum		
<b>Jumlah</b>			

## V. STRUKTUR DAN KOMPOSISI KOMPETENSI SDM PENGAWASAN

### 1) Struktur dan Komposisi SDM Pengawasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No.	Uraian	Jumlah	
		Orang	%
a.	Sarjana S3		
b.	Sarjana S2		
c.	Sarjana S1 / Diploma IV		
d.	Diploma III		
e.	Diploma I / II		
f.	SLTA / SLTP / SD		
<b>Jumlah</b>			

### 2) Struktur dan Komposisi SDM Pengawasan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah	
		Orang	%
a.	Ekonomi/Akuntansi/Manajemen		
	Magister ekonomi		
	Magister Akuntansi		
	Magister Manajemen		
	Sarjana Ekonomi		
	Sarjana Ekonomi Akuntansi		
	Sarjana Ekonomi Manajemen		
	Sarjana manajemen industri		
b.	Teknik		
	Magister Teknik		
	Master Engineering		
	Sarjana Teknik Industri		
	Sarjana Teknik Informatika		
	Sarjana Teknik Kimia		
	Sarjana Teknik Metalurgi dan Material		
	Sarjana Teknik Perkapalan		
c.	Sosial – politik / pemerintahan		
	Magister ilmu administrasi		
	Sarjana administrasi Negara		
	Sarjana administrasi niaga		
	Magister Public Administration		

No.	Uraian	Jumlah	
		Orang	%
	Sarjana Ilmu Politik		
d.	Hukum		
	Magister Kenotariatan		
	Magister Hukum		
	Sarjana Hukum		
e.	Lain-lain		
	Magister Sience		
	Magister Food Science Technology A Nutrition		
	Sarjana Teknologi Informasi		
	Sarjana Teknologi Pertanian		
	sarjana Ilmu Komunikasi		
f.	Non spesifik (SLTA)		
<b>Jumlah</b>			

3) Struktur dan Komposisi SDM Pengawasan Berdasarkan Sertifikat Profesi Yang Dimiliki

No.	Uraian	Jumlah	
		Orang	%
a.	Bersertifikat Jabatan Fungsional Auditor		
b.	Bersertifikat Internal Auditing seperti CIA/MIIA/PIIA		
c.	Bersertifikat Akuntansi Publik seperti CA/CPA /ACCA/ACA		
d.	Bersertifikat Akuntansi Manajemen/ Akuntansi Umum seperti CMA/CIMA/CGA		
e.	Bersertifikat Audit Investigasi		
f.	Bersertifikat Pengadaan Barang / Jasa		
g.	Lain - lain (manjemen pengawasan)		

4) Komposisi SDM Pengawasan Berdasarkan Masa Kerja di Lingkungan APIP

No.	Uraian	Jumlah	
		Orang	%
<b>(1)</b>	<b>Pejabat Struktural</b>		
a.	Masa kerja di unit APIP 0 s.d 2 tahun		
b.	Masa Kerja di unit APIP 2 s.d 5 tahun		
c.	Masa kerja di unit APIP 5 s.d 10 tahun		
d.	Masa kerja di unit APIP 10 tahun keatas		
	<b>Jumlah (1)</b>		
<b>(2)</b>	<b>Auditor</b>		

No.	Uraian	Jumlah	
		Orang	%
a.	Masakerja di unit APIP 0 s.d 2 tahun		
b.	MasaKerja di unit APIP 2 s.d 5 tahun		
c.	Masakerja di unit APIP 5 s.d 10 tahun		
d.	Masakerja di unit APIP 10 tahunkeatas		
	<b>Jumlah (2)</b>		
<b>(3)</b>	<b>PegawaiPelaksanaKegiatanPengawasan Bukan Auditor</b>		
a.	Masa Kerja di unit APIP 0 s.d 2 tahun		
b.	Masa Kerja di unit APIP 2 s.d 5 tahun		
c.	Masa Kerja di unit APIP 5 s.d 10 tahun		
d.	Masa Kerja di unit APIP 10 tahun ke atas		
	<b>Jumlah (3)</b>		
	<b>Total</b>		

#### VI. Upaya peningkatan kompetensi SDM pengawasan

No.	Uraian	Satuan	Tahun sebelumnya	Tahun ini
1)	Jumlah anggaran belanja APIP untuk beasiswa pendidikan S2/S3 atau perolehan Sertifikasi Profesi	rupiah		
2)	Jumlah SDM Pengawasan yang mendapat beasiswa pendidikan S2/S3 atau perolehan Sertifikasi Profesi per tahun	pegawai		
3)	Jumlah anggaran belanja diklat/ seminar/ kegiatan sejenis lainnya	Milyar rupiah		
4)	Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti diklat teknis substansi pengawasan atau diklat teknis lainnya	pegawai		
5)	JumlahkegiatanPelatihan di Kantor Sendiri( <i>in-house training</i> )	kegiatan		



**FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP**  
**ELEMEN I: PERAN DAN LAYANAN**

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban				
						Ya	Sebagian	Tidak		
<b>LEVEL 2</b>										
1	APIP memberikan jasa audit Ketaatan ( <i>compliance auditing</i> )	1	APIP melakukan audit kepatuhan atas area, proses, atau sistem tertentu terhadap peraturan (kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan, kontrak, atau kriteria lain yang mengatur pelaksanaan area, proses, atau sistem yang menjadi ruang lingkup audit).	1	Kami telah melakukan kegiatan pengawasan berupa audit atas transaksi atau dokumen tertentu untuk menilai akurasi perhitungan.	Auditor sudah melaksanakan prosedur audit standar untuk menilai akurasi perhitungan (seperti <i>vouching, tracing</i> ).	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit			
		2	Kegiatan pengawasan yang kami lakukan bersifat audit kepatuhan ( <i>compliance auditing</i> ).		PKPT/PKAT berisi rencana audit untuk menguji kepatuhan antara kondisi dengan kriteria yang ada. Audit kepatuhan mencakup audit atas transaksi-transaksi keuangan, audit atas kelayakan pengambilan keputusan administratif, dan setiap audit dengan pendekatan proses.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>.</li> <li>•</li> </ul>				
		3	Kami telah memiliki		Terdapat <i>Internal Audit</i>	<i>Internal Audit Charter</i>				

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			<p><i>internal audit charter yang mengungkapkan mengenai sifat jasa assurance yang dapat diberikan APIP saat ini, yaitu audit kepatuhan (compliance auditing).</i></p>	<p>Charter yang di dalamnya mengungkapkan mengenai sifat jasa assurance yang dapat diberikan APIP saat ini, yaitu audit kepatuhan (<i>compliance auditing</i>).</p> <p><b>IAC merupakan</b> pernyataan tertulis yang berisi visi, misi, tujuan internal audit, kewenangan dan tanggung jawab APIP dalam organisasi, independensi, akses dan kerahasiaan, jasa layanan yang bisa diberikan oleh APIP (sangat tergantung sumber daya yang dimiliki), ruang lingkup audit, standar yang digunakan, hubungan dengan external audit, dan pelaporan audit; yang dibuat dengan tujuan untuk membangun komitmen tertulis dari pucuk pimpinan organisasi (K/L/Pemda) sehingga:</p> <p>1). tidak ada pembatasan ruang lingkup dalam pelaksanaan tugas APIP;</p> <p>2). Terjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan</p>	<p>memuat sifat layanan penjaminan (<i>assurance</i>) yang dilaksanakan APIP, yaitu audit kepatuhan (<i>compliance auditing</i>).</p>			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
				pengawasan intern; 3). terjamin akses terhadap seluruh informasi yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan intern.				
		4	Setiap tim yang melaksanakan penugasan pengawasan telah menyusun rencana dan program kerja audit pada tingkat tim audit secara terstruktur (mencakup pengidentifikasian kriteria yang relevan; pendokumentasian survei atas pengendalian intern; pengidentifikasian sasaran, ruang lingkup, dan metodologi pengawasan; serta pengembangan rencana audit rinci).	Setiap tim yang melaksanakan penugasan pengawasan telah menyusun rencana dan program kerja audit pada tingkat tim audit sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah - PENGENDALIAN MUTU ATAS PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit			
		5	Kami telah melaksanakan penugasan pengawasan yang mencakup penerapan prosedur pengawasan yang spesifik, penyusunan kertas kerja (KKA) atas prosedur yang dilaksanakan dan hasil-hasilnya, pengevaluasian	1). Auditor sudah melaksanakan prosedur audit untuk menguji kesesuaian dan kepatuhan antara kondisi dengan kriteria yang ada (mis: prosedur analitis, konfirmasi, cek fisik). 2). Setiap prosedur audit yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan tidak dilaksanakan mis:	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			informasi yang diperoleh, pembuatan simpulan yang spesifik dan pengembangan rekomendasi.	KKA yang merujuk ke Nomor PKA dan PKA yang merujuk Nomor KKA). 3). Auditor telah melakukan evaluasi atas informasi yang diperoleh. 4). Auditor menyusun simpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang relevan yang dituangkan dalam KKA. 5). Auditor mengembangkan rekomendasi yang bersifat menghilangkan penyebab. 6). Penggunaan Kartu Kendali Mutu dan supervisi penugasan.				
		6	Kami telah menyusun laporan untuk mengomunikasikan hasil penugasan pengawasan.	1. LHA disusun sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah - PROSEDUR PENGENDALIAN MUTU PELAPORAN AUDIT, yang meliputi a.l.: 1). Ketua Tim dibantu Anggota Tim telah menyusun konsep LHA berdasarkan hasil audit yang didokumentasikan dalam KKA dan temuan audit yang telah dikomunikasikan dg auditi. 2). Konsep LHA direviu oleh Pengendali Teknis. 3). Konsep LHA direviu oleh Pengendali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit</li> </ul>			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
				Mutu/Pimpinan APIP. 4). LHA final didistribusikan kpd pihak2 yang berwenang. 2. Terdapat mekanisme pemantauan tindak lanjut sesuai Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah .				
		7	Dengan audit yang kami lakukan, kami telah dapat memberikan keyakinan yang memadai ( <i>assurance</i> ) bahwa area / proses / sistem yang diaudit telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaannya (kebijakan / rencana / prosedur / hukum / peraturan / kontrak / kriteria lain).	1). Perencanaan pengawasan pada tingkat tim audit sudah sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah ; 2). prosedur atau langkah2 audit yang dituangkan dalam Program Kerja Audit sudah dilakukan sesuai dengan tujuannya; 3). mekanisme pelaporan dan tindak lanjut sudah sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah; 4). LHA menunjukkan bahwa area / proses / sistem yang diaudit telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaannya.	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
		8	Audit ketaatan yang kami lakukan telah dapat mencegah dan mendeteksi tindakan ilegal dan penyimpangan terkait dengan kebijakan / prosedur / persyaratan kontrak yang ada.	1). Perencanaan pengawasan pada tingkat tim audit sudah sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah ; 2). prosedur atau langkah2 audit yang dituangkan dalam Program Kerja Audit sudah dilakukan sesuai dengan tujuannya; 3). mekanisme pelaporan dan tindak lanjut sudah sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah.	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit			
		9	Hasil rekomendasi kami telah ditindaklanjuti.	1). Perencanaan pengawasan pada tingkat tim audit sudah sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah ; 2). prosedur atau langkah2 audit yang dituangkan dalam Program Kerja Audit sudah dilakukan sesuai dengan tujuannya; 3). mekanisme pelaporan dan tindak lanjut sudah sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah.	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pemantauan Tindak Lanjut			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban			
						Ya	Sebagian	Tidak	
<b>LEVEL 3</b>									
1	APIP melaksanakan <i>value for money audit</i> / program evaluasi	1	APIP melaksanakan penilaian dan pelaporan atas efisiensi, efektivitas, dan kehematan (dari operasi, aktivitas, atau program; atau berkaitan dengan tata kelola/manajemen risiko/pengendalian ( <i>governance, risk management, and control</i> )), dan hasil yang dicapai.	10	Kegiatan pengawasan yang kami lakukan mencakup penilaian atas efisiensi, efektivitas, dan kehematan dari operasi, aktivitas atau program organisasi (K/L/Pemda) dan hasil-hasil yang telah dicapai.	PKPT/PKAT berisi rencana audit untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kehematan dari operasi, aktivitas, atau program auditi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i></li> </ul>		
				11	Kegiatan pengawasan lain (evaluasi, reviu, pemantauan) yang kami lakukan terkait dengan tata kelola/manajemen risiko/pengendalian	1). PKPT/PKAT berisi rencana APIP untuk melakukan penugasan pengawasan lain (evaluasi, reviu, pemantauan) terkait dengan tata kelola/manajemen risiko/pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i></li> </ul>		
				12	Kami telah memiliki <i>internal audit charter</i> yang mengungkapkan mengenai sifat jasa <i>assurance</i> yang dapat diberikan APIP saat ini, yaitu <i>value for money audit</i> (audit atas ekonomis, efisiensi, efektivitas (3e) / evaluasi program / evaluasi kebijakan).	Terdapat <i>IAC</i> yang di dalamnya mengungkapkan mengenai sifat jasa <i>assurance</i> yang dapat diberikan APIP saat ini, yaitu <i>value for money audit</i> (audit atas ekonomis, efisiensi, efektivitas (3e) / evaluasi program / evaluasi kebijakan).	<i>Internal Audit Charter</i> (yang mencakup layanan audit kinerja-3E, pemberian layanan <i>advisory</i> )		

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
		13	Pengawasan yang kami lakukan telah meningkatkan perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi (KL/Pemda).	1). PKA, KKA, dan LHA untuk tujuan tsb disusun sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah; 2). Rekomendasi sudah sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah dan dapat ditindaklanjuti.	Pedoman/Panduan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan atas Audit 3 E, pemberian layanan <i>advisory</i> )			
		14	Kami telah memberikan pengaruh terhadap perubahan ke arah peningkatan efektivitas, efisiensi, dan peningkatan kinerja organisasi.	1). PKA, KKA, dan LHA untuk tujuan tsb disusun sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah; 2). Rekomendasi sudah sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah dan dapat ditindaklanjuti.	Pedoman/Panduan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan atas Audit 3 E, pemberian layanan <i>advisory</i> )			
		15	Kegiatan pengawasan yang kami lakukan telah dapat mengurangi besaran/paparan dari risiko organisasi yang dapat terjadi.	1). PKA, KKA, dan LHA untuk tujuan tsb disusun sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah; 2). Rekomendasi sudah sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah dan dapat ditindaklanjuti.	Pedoman/Panduan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan atas Audit 3 E, pemberian layanan <i>advisory</i> )			



Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban				
						Ya	Sebagian	Tidak		
2	APIP memberikan jasa advis ( <i>advisory services</i> ).	1	APIP melaksanakan analisis atas kondisi/situasi dan memberikan pedoman dan nasehat kepada manajemen. Jasa advis yang diberikan menambah nilai tanpa menggantikan tanggung jawab manajemen. Jasa advis diarahkan melalui fasilitasi bukannya penjaminan, yang termasuk di dalamnya adalah pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling dan pemberian nasihat.	16	Kami telah melakukan penugasan pengawasan berupa pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen (mencakup a.l: pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian pengendalian mandiri ( <i>Control Self Assessment / CSA</i> ), dan penilaian kinerja mandiri, konseling dan pemberian nasihat).	1). PKPT/PKAT berisi rencana APIP untuk melakukan pemberian jasa advis (mis: APIP melakukan reviu laporan keuangan, tetapi tidak boleh ikut menyusun laporan keuangan tsb. 2). Mekanisme pemberian jasa advis tsb diatur dalam pedoman atau panduan atau SOP.	• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i>			
				17	Kami telah memiliki <i>internal audit charter</i> yang mengungkapkan mengenai sifat jasa advis ( <i>advisory services</i> ) yang dapat diberikan APIP saat ini, dan mencantumkan jenis2 <i>advisory services</i> yang dapat dilakukan APIP saat ini.	Terdapat <i>IAC</i> yang di dalamnya mengungkapkan mengenai sifat jasa pemberian saran ( <i>advisory services</i> ) yang dapat diberikan APIP saat ini, dan mencantumkan jenis2 <i>advisory services</i> yang dapat dilakukan APIP saat ini.	<i>Internal Audit Charter</i> (yang mencakup layanan audit kinerja-3E, pemberian layanan <i>advisory</i> )			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
		18	Jasa advis kami memberikan nilai tambah bagi organisasi	1). Mekanisme pemberian jasa advis sudah sesuai dengan panduan/pedoman/SOP . 2). Terdapat rekomendasi yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.	Pedoman/Panduan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan atas Audit 3 E, pemberian layanan <i>advisory</i> )			
		19	Kami telah melaksanakan praktik-praktik yang menjamin bahwa independensi dan obyektifitas kami tidak tercederai pada saat pemberian jasa advis.	1). Mekanisme pemberian jasa advis sudah sesuai dengan panduan/pedoman/SOP . 2). Pembuktian adanya independensi dan obyektifitas dapat diperoleh melalui pernyataan independensi dan obyektifitas yang dibuat oleh auditor, dan juga dapat ditambahkan dari "kuesioner pelanggan" setelah selesainya pemberian jasa advis (bila memungkinkan).	Surat Pernyataan independensi dan obyektifitas auditor dan Kuesioner Kepuasan Pelanggan			
<b>LEVEL 4</b>								
1	APIP memberikan jaminan menyeluruh atas tata Kelola, manajemen risiko , dan pengendalian organisasi.	1	APIP telah melaksanakan kegiatan pengawasan yang cukup dalam rangka pemberian opini <i>atas efektivitas dan kecukupan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan proses pengendalian secara menyeluruh.</i>	20	Kami telah melaksanakan audit atas manajemen risiko pada lingkup organisasi secara keseluruhan ( <i>enterprise wide risk</i> ) .			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
	2	APIP telah mengoordinasikan kegiatan pengawasannya sehingga dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa seluruh proses dalam organisasi telah cukup dan berfungsi sesuai yang diharapkan untuk mencapai tujuan organisasi.	21	Kami telah melakukan atestasi (pengujian) atas kewajaran dari asersi (pernyataan) manajemen atas keefektifan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.				
			22	Kami telah memiliki <i>internal audit charter</i> yang di dalamnya menunjukkan kewenangan untuk memberikan pendapat (opini) atas organisasi secara keseluruhan (efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian).				
			23	Kami telah melakukan perencanaan pengawasan yang berbasis risiko.				
			24	Pimpinan Instansi (K/L/Pemda) dan pemangku kepentingan kami mempunyai keyakinan bahwa tata kelola organisasi, manajemen risiko organisasi, dan proses pengendalian				

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			organisasi telah memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan organisasi akan dicapai.					
<b>LEVEL 5</b>								
1	Internal auditing dianggap sebagai agen perubahan kunci .	1	APIP telah cukup mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan profesionalisme untuk dapat memberikan pandangan-pandangan ke depan dan bertindak sebagai katalis guna menghasilkan perubahan positif dalam organisasi.	25	Kegiatan pengawasan kami telah dapat memberikan jaminan memadai dan pemberian saran (advisory services) termasuk cakupan audit pada area tata kelola, pengendalian tingkat entitas, kecurangan, usulan strategi baru, program atau praktek bisnis yang dibutuhkan oleh organisasi.			
				26	Kami telah melakukan <i>update</i> atas <i>internal audit charter</i> yang mencakup perluasan peran dan ruang lingkup kegiatan pengawasan.			
				27	Kami telah memiliki kapasitas kepemimpinan dan profesionalisme yang maju sehingga dapat berperan sebagai katalis, agen perubahan, dan mampu memberikan prediksi ke depan			

Key Process Area	No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
		untuk mendorong perubahan positif bagi organisasi.					
	28	Kami telah menggunakan manajemen risiko organisasi secara keseluruhan ( <i>Enterprise Risk Management</i> ) sebagai suatu kesatuan dari strategi APIP.					
	29	Fokus strategi kami ditekankan pada inovasi, layanan kepada pemangku kepentingan, dan pemberian nilai.					
	30	Kami berperan penting ( <i>key player</i> ) dalam memberikan kontribusi bagi penentuan visi organisasi dalam menanggapi kebutuhan intern maupun ekstern organisasi.					

**FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP  
ELEMEN II: PENGELOLAAN SDM**

Key Process Area	No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban			
					Ya	Sebagian	Tidak	
<b>LEVEL 2</b>								
1 APIP mengidentifikasi dan merekrut orang-orang yang kompeten.	1	Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh auditor yang memiliki kompetensi yang relevan.	1 Kami telah mengidentifikasi kompetensi (pengetahuan, keahlian teknis, sikap) dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan.	APIP memiliki dokumen hasil identifikasi atas kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta Kompetensi SDM (Data Pegawai termasuk kompetensinya)</li> <li>• SOP Penyusunan Peta Kompetensinya</li> </ul>			
	2	Kami telah memiliki uraian jabatan ( <i>job description</i> ) untuk setiap posisi jabatan di unit kerja kami yang disusun berdasarkan analisis jabatan dan dievaluasi secara berkala.	2 Kami telah memiliki uraian jabatan ( <i>job description</i> ) untuk setiap posisi jabatan di unit kerja kami yang disusun berdasarkan analisis jabatan dan dievaluasi secara berkala.	Terdapat dokumen uraian jabatan untuk setiap posisi jabatan pada APIP. Uraian jabatan berisi: uraian pekerjaan (tanggung jawab, wewenang, deskripsi pekerjaan, dll); Ukuran kinerja yang dipersyaratkan, sebagai indikator terhadap keberhasilan menyelesaikan tanggungjawab utama jabatan; persyaratan jabatan ( <i>Job Requirement</i> ).	Uraian jabatan (termasuk peraturan pemberlakuan-nya)			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
		3	Kami telah menentukan klasifikasi pemberian tunjangan untuk setiap posisi jabatan di unit kerja kami.	APIP telah menyusun klasifikasi pemberian insentif bagi staf APIP sesuai dengan uraian jabatan, kompetensi, pengalaman, dan kinerja; dan telah mengusulkannya kepada pimpinan K/L/Pemda.	Klasifikasi pemberian tunjangan untuk setiap posisi jabatan di Unit Kerja APIP			
		4	Proses rekrutmen kami telah dapat memperoleh pegawai yang kompeten (memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan intern).	1). APIP memiliki auditor dengan jumlah sesuai yang diperlukan dan dengan kualitas sesuai dengan hasil identifikasi kompetensi. 2). Terdapat dokumen permintaan staf yang dibutuhkan berdasarkan hasil identifikasi kompetensi.	Penghitungan kebutuhan auditor dan SDM APIP beserta panduan rekrutmen			
		5	Kegiatan pengawasan intern yang kami lakukan sudah memenuhi kecermatan profesi ( <i>due professional care</i> ) dan menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi yang bermutu.	1). Seluruh penugasan pengawasan dilaksanakan oleh auditor yang kompeten (kompeten dapat dilihat dari apakah ybs sdh memiliki sertifikasi auditor dan atau sertifikasi profesi internal auditor lainnya. Bila belum bersertifikat (sambil ybs menunggu proses sertifikasi), latar belakang pendidikan ybs adalah akuntansi atau pernah mengikuti	Kebijakan rekrutmen dan <i>staffing</i> pegawai			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban			
						Ya	Sebagian	Tidak	
				diklat terkait kegiatan pengawasan yang dilakukan. 2). Apabila penugasan pengawasan menggunakan tenaga ahli dari luar APIP, sudah dilakukan supervisi dengan semestinya.					
2	APIP telah melakukan pengembangan profesi bagi individu auditor	1	APIP telah memastikan bahwa auditor di lingkungannya secara berkelanjutan mempertahankan dan meningkatkan kapabilitas profesional mereka.	6	Kami telah memiliki dokumen tertulis yang memuat rencana <i>training</i> , misalnya rencana pendidikan dan pelatihan bagi setiap auditor, dan rencana PPM/PKS, dan lain-lain.	Terdapat dokumen rencana diklat bagi setiap auditor, meliputi jenis dan jumlah diklat, penyelenggara diklat, waktu diklat, anggaran, dan SDM yang akan ikut diklat.	Panduan / Petunjuk penyusunan rencana dan penyelenggaraan <i>training</i> . Dokumen rencana /usulan <i>training</i> (diklat, PPM/PKS, dll) bagi setiap individu		
				7	Kami telah mendorong setiap auditor untuk menjadi anggota profesi.	Bentuk dorongan tsb antara lain: APIP menyediakan anggaran khusus untuk menjadi anggota profesi; atau adanya pemberian ijin kepada auditor untuk menghadiri acara2 yang diselenggarakan oleh profesi seperti diklat, seminar, ujian sertifikasi profesi, workshop, dll.	Nota dinas / Surat Edaran tentang kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi profesi		



Key Process Area	No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
	8	Kami telah memantau dan mendokumentasikan untuk memastikan bahwa kebutuhan <i>training</i> setiap auditor telah terpenuhi, serta membuat laporannya.	Terdapat laporan periodik yang berisi daftar <i>training</i> yang telah diikuti oleh setiap auditor.	Laporan penyelenggaraan <i>training</i> (diklat, PPM/PKS, dll), dalam rangka memantau pemenuhan kompetensi setiap individu pegawai terkait dengan PKPT yang akan dilakukan			
	9	Kami telah meyakini bahwa kompetensi (keahlian, pengetahuan dan perilaku) pada semua posisi telah memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami.	1). APIP memiliki dokumen hasil identifikasi atas kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan. 2). Rekrutmen auditor telah sesuai dengan usulan permintaan staf yang dibutuhkan.	Pelaporan pemantauan kompetensi setiap individu			
	10	Setiap auditor memiliki komitmen untuk terus menerus meningkatkan kompetensi profesionalnya.	Kecukupan angka kredit pengembangan profesi untuk setiap auditor.	Pelaporan pemantauan kompetensi setiap individu			
	11	Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki sertifikasi di bidang pengawasan internal pemerintah	Seluruh auditor telah bersertifikasi JFA.	Peta kompetensi			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban				
						Ya	Sebagian	Tidak		
		12	Kami telah menyusun perencanaan jumlah jam pelatihan minimal bagi setiap auditor yang harus dipenuhi setiap tahunnya sesuai dengan aturan yang berlaku	APIP merencanakan kegiatan PKS, seminar, workshop, diklat, dll untuk setahun.	Dokumen rencana /usulan <i>training</i> (diklat, PPM/PKS, dll) bagi setiap individu					
<b>LEVEL 3</b>										
1	Adanya koordinasi satuan tugas SDM APIP ( <i>Workforce</i> ).	1	APIP telah melakukan penyelarasan PKPT dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang dimiliki.	13	Kami telah mengestimasi jumlah dan ruang lingkup kegiatan audit dan kegiatan pengawasan lainnya dan membandingkan dengan jumlah dan keahlian SDM yang tersedia .	Terdapat dokumen hasil <i>mapping</i> jumlah SDM dan kompetensi yang dibutuhkan dengan yang tersedia pada APIP untuk melihat adanya <i>competency gap</i> .	Peta Kompetensi Pegawai			
				14	PKPT yang kami susun telah memperhatikan skala prioritas dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia.	PKPT/PKAT dilengkapi dengan susunan tim auditor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i></li> <li>• SOP Penyusunan PKPT Berbasis Risiko</li> </ul>			
				15	Kebijakan organisasi APIP telah mendukung koordinasi satuan tugas	Terdapat SK pimpinan APIP terkait koordinasi satuan tugas	Kebijakan Organisasi yang mendukung pengoptimalan tim audit misalnya penugasan lintas inspektorat/irban, pola hubungan tim, dll.			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban				
						Ya	Sebagian	Tidak		
2	Tersedianya staf APIP yang berkualifikasi profesional.	1	Semua pegawai APIP adalah pegawai berkompeten dalam bidangnya.	16	Kami memiliki kerangka kompetensi setiap jabatan yang mencakup pola pengembangan karir dan kriteria penilaian kinerja.	Kerangka kompetensi auditor APIP disusun merujuk ke Standar Kompetensi Auditor Per Kepala BPKP Nomor: PER-211/K/JF/2010.	Kerangka Kompetensi Pegawai			
				17	Kami mempunyai rencana pelatihan dan pengembangan setiap pegawai yang berpedoman pada kerangka kompetensi.	Rencana pelatihan dan pengembangan pegawai merujuk ke diklat sertifikasi JFA dan diklat teknis substansi yang dikembangkan Pusdiklatwas BPKP maupun dikembangkan sendiri oleh APIP.	Dokumen rencana <i>training</i> untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa <i>advisory</i>			
				18	Kami mempunyai program pengembangan sertifikasi jabatan fungsional auditor.	Terdapat anggaran untuk program pengembangan sertifikasi jabatan fungsional auditor merujuk ke kalender diklat sertifikasi JFA. Apabila perolehan sertifikasi tsb dibiayai sendiri oleh auditor maka APIP mendukungnya dalam bentuk pemberian ijin pelatihan maupun perolehan sertifikasi.	Dokumen rencana <i>training</i> untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa <i>advisory</i>			
				19	Kami mempunyai program untuk perolehan sertifikasi profesi internal auditor seperti QIA,	Terdapat anggaran untuk program perolehan sertifikasi. Apabila perolehan sertifikasi tsb dibiayai	Dokumen rencana <i>training</i> untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa <i>advisory</i>			

Key Process Area	No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
		CIA, CGAP, CFE, dll.	sendiri oleh auditor maka APIP mendukungnya dalam bentuk pemberian ijin pelatihan maupun perolehan sertifikasi.				
	20	Kami telah memiliki mekanisme pemberian <i>reward</i> /penghargaan bagi pegawai yang berkinerja memuaskan atau terbaik pada setiap tingkatan.	Terdapat dokumen yang menjelaskan kebijakan pemberian <i>reward</i> tsb.	Klasifikasi pemberian <i>reward</i> Klasifikasi pemberian tunjangan untuk setiap posisi jabatan di Unit Kerja APIP dikaitkan dengan kinerja Sistem penilaian kinerja tahunan			
	21	Kami telah menentukan kombinasi keahlian dan jenjang jabatan auditor yang diperlukan saat ini, dan menilai apakah dapat dilakukan pengembangan kemampuan auditor secara internal atau melalui kerja sama dengan pihak lain ( <i>co-sourcing</i> ) maupun melimpahkan pekerjaan kepada pihak lain ( <i>outsourcing</i> ).	Terdapat dokumen hasil analisis kekuatan sumber daya APIP terhadap beban kerja APIP.	Dokumen hasil analisis kekuatan sumber daya APIP terhadap beban kerja APIP			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban				
						Ya	Sebagian	Tidak		
		22	Semua posisi telah dijabat oleh pegawai yang kompeten di bidangnya.	Seluruh staf yang melaksanakan penugasan pengawasan telah memiliki sertifikasi JFA dan atau sertifikasi profesi internal auditor lainnya. Bila belum bersertifikat (sambil ybs menunggu proses sertifikasi), latar belakang pendidikan ybs adalah akuntansi atau pernah mengikuti diklat terkait kegiatan pengawasan yang dilakukan.	Dokumen Peta Kompetensi Pegawai					
		23	Kami telah mempunyai metoda yang sistematis untuk penilaian kinerja bagi setiap individu secara adil dan transparan yang berpedoman pada kerangka kompetensi.	Terdapat Satuan Kinerja Individu (SKI) / Satuan Kinerja Pegawai (SKP)	Dokumen SKI atau SKP untuk seluruh Auditor					
		24	Kami telah memiliki sistem pengembangan karier (promosi, rotasi, dan mutasi) dengan membandingkan kinerja auditor dengan kinerja yang diharapkan.	1). Sistem pengembangan karier mengacu pada SKI. 2). Pola karier auditor jelas (promosi, rotasi, dan mutasi sesuai dengan kinerja auditor, bukan acak).	Kebijakan rotasi dan mutasi internal APIP yang sehat dan berpola					
3	Adanya kompetensi dan <i>team building</i> .	1	Adanya pengembangan kemampuan individu untuk dapat bekerja	25	Kami telah memiliki mekanisme komunikasi dan koordinasi tim audit.	Pola komunikasi dan koordinasi tim audit mengacu pada Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan	Nota Dinas/Memo/SE Tentang penyelenggaraan komunikasi internal APIP			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
	dalam tim secara efektif.			Instansi Pemerintah.				
		26	Kami telah memiliki kriteria untuk praktek dan perilaku kerja tim yang efektif yang dicantumkan pada kerangka/standar kompetensi.	Kerangka kompetensi auditor APIP mencantumkan kriteria untuk praktek dan perilaku kerja tim yang efektif.	Kerangka Kompetensi Pegawai			
		27	Kami telah memiliki program pengembangan kompetensi tim seperti kepemimpinan tim, komunikasi yang efektif, kerja sama tim, pembangunan hubungan dalam tim.	Terdapat kebijakan pimpinan APIP terkait dengan pengembangan kompetensi tim.	Dokumen rencana <i>training</i> untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa <i>advisory</i>			
		28	Kami telah mempunyai pedoman tata laksana tim audit yang menetapkan dengan jelas dan tegas tanggungjawab, kewajiban, dan kewenangan dari para anggota tim audit.	Terdapat pedoman tata laksana tim audit (dokumentasi pola hubungan internal tim audit), bisa berupa SK pimpinan APIP, SOP kegiatan pengawasan.	Kebijakan Organisasi yang mendukung pengoptimalan tim audit misalnya penugasan lintas inspektorat/urban, pola hubungan tim, dll.			
		29	Kami telah memiliki mekanisme pemberian penghargaan bagi tim yang berhasil menerapkan perilaku yang diharapkan.	Terdapat dokumentasi atas kebijakan pimpinan APIP terkait pemberian penghargaan bagi tim.	Kebijakan pemberian penghargaan berbasis tim			
		30	Kami telah mengembangkan setiap personal dalam	Terdapat dokumen evaluasi pelaksanaan penugasan dan	Dokumen rencana <i>training</i> untuk memenuhi kompetensi			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			tim untuk selalu siap berganti peran ( <i>assurance dan consulting</i> ) seiring dengan perubahan organisasi.	dokumen rencana pengembangan pegawai berdasarkan hasil evaluasi tersebut.	pelaksanaan audit 3E dan jasa <i>advisory</i>			
		31	Kami memiliki tim-tim yang produktif yang saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.	Terdapat forum untuk memberi kesempatan saling berbagi antar tim (dibuktikan dengan adanya notulen/laporan).				
		32	Kami telah memberikan kesempatan kepada staf kami untuk mengembangkan kemampuan individu dan profesinya dalam hal komunikasi, kepemimpinan, dan pengembangan hubungan kerja.	Terdapat dokumen rencana pengembangan pegawai.				
<b>Level 4</b>								
1	Perencanaan satuan kerja SDM APIP (Workforce planning)	1	APIP mengkoordinasikan seluruh SDM yang ada untuk dapat melaksanakan tupoksinya. Termasuk merencanakan sumber daya, keahlian, pelatihan, dan sarana yang dibutuhkan untuk	33	Kami memiliki perencanaan penugasan tahunan yang dapat merencanakan pegawai dengan kompetensi, penugasan, dan penggunaan perangkat, serta pada saat yang tepat untuk menangani area-area penting yang berisiko (sebagaimana telah diidentifikasi dalam			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
	melaksanakan penugasan pengawasan.		perencanaan audit berbasis risiko) pada organisasi K/L/Pemda.					
		34	Kami telah melakukan analisis kesenjangan kompetensi yang kami miliki saat ini dengan yang kami butuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas saat ini dan beberapa tahun mendatang.					
		35	Kami telah mengomunikasikan prioritas dan strategi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi beberapa tahun mendatang kepada pimpinan K/L/Pemda dan para pemangku kepentingan utama, terutama jika keseluruhan rencana kegiatan pengawasan berkala tidak dapat dilakukan.					
		36	Kami telah memiliki SDM dengan kapasitas yang cukup memuaskan dari segi kompetensi, jumlah personil, dan sarana, untuk dapat menyelesaikan seluruh rencana kegiatan pengawasan berkala					



Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			yang menjadi tanggung jawab kami.					
2	APIP mendukung organisasi profesi.	1	APIP memberikan kesempatan bagi staf auditor untuk mengembangkan profesionalisme dan kepemimpinan melalui keterlibatan dan partisipasi mereka dalam organisasi profesi.	37	Kami telah mengidentifikasi organisasi profesi yang relevan dan terkait dengan strategi dan operasi unit kerja kami.			
			38	Kami telah <u>menetapkan mekanisme dan kriteria</u> untuk mendukung pegawai yang berpartisipasi dalam kegiatan organisasi profesi <u>melalui dukungan keuangan, waktu, dan sumber daya lainnya.</u>				
			39	Kami mendorong staf auditor yang aktif terlibat dalam organisasi profesi untuk melaporkan sumbangsuhnya terhadap organisasi profesi guna pengembangan karirnya dalam organisasi K/L/Pemda.				
			40	Kami telah memanfaatkan				

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			pengetahuan yang diperoleh staf auditor dari keterlibatannya pada organisasi profesi untuk meningkatkan kapasitas SDM APIP dalam kegiatan pengawasan.					
		41	Kami telah menginformasikan kepengurusan dan kontribusi kami pada organisasi profesi dalam laporan kinerja kami.					
3	Adanya kontribusi kegiatan pengawasan terhadap pengembangan manajemen.	1	Adanya pengintegrasian pengembangan manajerial organisasi K/L/Pemda melalui pelatihan dan pengalaman dalam kegiatan pengawasan intern (APIP sebagai <i>training ground</i> bagi manajer K/L/Pemda), dan sebaliknya .	42	Kami telah mengembangkan hasil kegiatan pengawasan intern dalam berbagai kajian, riset, telaahan, untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang bernilai bagi organisasi.			
				43	Kami telah mengembangkan mekanisme yang tepat dalam organisasi K/L/Pemda untuk memunculkan calon-calon yang dapat berkontribusi dalam			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			kegiatan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang bernilai bagi organisasi.					
		44	Kami telah mengidentifikasi calon-calon dari APIP maupun organisasi K/L/Pemda yang dapat menarik manfaat dari kegiatan pengembangan profesi dan penerapan konsep tata kelola, manajemen risiko dan prinsip pengendalian.					
		45	Kegiatan pengawasan yang kami lakukan merupakan sarana bagi para pimpinan organisasi K/L/Pemda untuk mengembangkan pemahaman mengenai tata kelola, manajemen risiko dan prinsip pengendalian.					
		46	Kami senantiasa menjadi contoh ( <i>role model</i> ) dalam organisasi untuk mempromosikan pentingnya tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.					
<b>Level 5</b>								

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
1	Adanya proyeksi satuan kerja SDM APIP ( <i>workforce projection</i> ).	1	APIP menyelaraskan kegiatan pengembangan SDM APIP jangka panjangnya untuk memenuhi kebutuhan bisnis APIP di masa mendatang sejalan dengan kebutuhan rencana strategis organisasi K/L/Pemda.	47	Kami telah menyelaraskan kegiatan pengembangan SDM jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan layanan yang akan kami berikan di masa mendatang sejalan dengan kebutuhan rencana strategis organisasi K/L/Pemda.			
				48	Adanya pengakuan dari organisasi (KL/Pemda) bahwa terdapat hubungan yang erat antara tujuan strategis organisasi, risiko organisasi, serta peningkatan kapasitas APIP dalam rangka memberikan nilai tambah bagi organisasi.			
				49	Kami telah mengembangkan rencana strategis yang terkait pengembangan SDM yang meliputi kompetensi, jumlah personil, dan perangkat yang dibutuhkan lima tahun mendatang dan selaras dengan renstra			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			organisasi K/L/Pemda.					
2	Para Pimpinan APIP dan auditor internal terlibat aktif dalam kepengurusan inti organisasi profesi.	1	APIP memfasilitasi dan mendukung penuh jajaran pimpinan dan staf auditor untuk menjadi pengurus inti dalam organisasi profesi yang relevan, yang dapat memberikan pengaruh bagi perkembangan profesi tersebut.	50	Kami telah menciptakan iklim yang kondusif guna mendukung jajaran pimpinan kami untuk menjadi pengurus inti dalam organisasi profesi yang relevan dan mengakui pencapaian yang berhasil diraihinya.			
			51	Kami telah melakukan pembelajaran dari APIP lain dan organisasi yang menaunginya dan mengintegrasikan praktik-praktik dan pemikiran strategis yang relevan dengan unit kami dan organisasi K/L/Pemda kami.				
			52	Kami telah memanfaatkan secara optimal pengetahuan yang diperoleh dari kepemimpinan pada organisasi profesi dan dari hasil pembelajaran dengan APIP lain dan organisasi yang				

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			menaunginya untuk meningkatkan strategi pembelajaran bagi organisasi K/L/Pemda kami.					
		53	Kami mempunyai pengaruh yang kuat kepada pengembangan dan arah profesi internal auditor.					
		54	Keterlibatan kami dalam organisasi profesi yang relevan mendorong kami untuk terus melakukan pembelajaran ( <i>continuous learning</i> ) serta meningkatkan wawasan dan pemikiran yang strategis.					
		55	Kami telah secara aktif mempromosikan pimpinan kami untuk menjadi pengurus inti organisasi profesi yang relevan.					

**FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP  
ELEMEN III: PRAKTIK PROFESIONAL**

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban				
						Ya	Sebagian	Tidak		
<b>LEVEL 2</b>										
1	Perencanaan pengawasan disusun berdasarkan pada prioritas manajemen/ pemangku kepentingan.	1	Adanya rencana pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan jasa lainnya) secara periodik (tahunan dan beberapa tahun) berdasarkan hasil konsultasi dengan manajemen dan atau pemangku kepentingan.	1	Pengawasan yang kami lakukan telah berdasarkan perencanaan	APIP memiliki perencanaan pengawasan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>,</li> <li>• <i>Audit Universe</i> (Peta Auditan),</li> <li>• SOP penyusunan PKPT</li> <li>•</li> </ul>			
		2	Kami telah memiliki Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)/Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).		Kami telah memiliki Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)/Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).	APIP telah menyusun PKPT/PKAT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>,</li> <li>• <i>Audit Universe</i> (Peta Auditan), dan</li> <li>• SOP penyusunan PKPT</li> </ul>			
		3	Dalam menyusun PKPT kami telah mengidentifikasi semua unit kerja (auditi) yang dapat dijadikan sebagai sasaran audit dan mengidentifikasi data/dokumen yang diperlukan dalam audit.		Dalam menyusun PKPT kami telah mengidentifikasi semua unit kerja (auditi) yang dapat dijadikan sebagai sasaran audit dan mengidentifikasi data/dokumen yang diperlukan dalam audit.	1). APIP memiliki <i>audit universe</i> (peta auditi). <i>Audit universe</i> merupakan obyek yang berpotensi untuk diaudit; dapat berupa divisi, bagian, bidang, cabang/perwakilan, kegiatan, proyek, kebijakan, program,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>,</li> <li>• <i>Audit Universe</i> (Peta Auditan), dan</li> <li>• SOP penyusunan PKPT</li> </ul>			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
				dsb. 2). <i>Audit universe</i> sudah memperhatikan: apakah obyek tsb mendukung tujuan, visi, dan misi organisasi; apakah obyek tsb memiliki pengaruh yang cukup material; apakah audit dan pengendalian layak dikembangkan thd obyek tsb; apakah dana yang dikelola obyek tsb cukup signifikan.				
		4	Kami telah mengidentifikasi area dan topik yang dipertimbangkan untuk menjadi prioritas kegiatan APIP dalam PKPT dengan berkonsultasi kepada manajemen/pemangku kepentingan.	PKPT/PKAT disusun sesuai dengan prioritas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>,</li> <li>• <i>Audit Universe</i> (Peta Auditan), dan</li> <li>• SOP penyusunan PKPT</li> </ul>			
		5	PKPT kami telah mempertimbangkan seluruh sumber daya yang diperlukan (mencakup : SDM, keuangan dan sarana prasarana).	PKPT/PKAT telah mencantumkan staf yang akan melakukan penugasan, jumlah biaya yang disediakan untuk menyelesaikan penugasan, dan sarana prasarana yang diperlukan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>,</li> <li>• <i>Audit Universe</i> (Peta Auditan), dan</li> <li>• SOP penyusunan PKPT</li> </ul>			
		6	PKPT yang kami susun telah disetujui oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemda.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>,</li> </ul>			



Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban			
						Ya	Sebagian	Tidak	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Audit Universe</i> (Peta Auditan), dan</li> <li>• SOP penyusunan PKPT</li> </ul>				
2	APIP memiliki kerangka kerja praktik profesional berikut prosesnya.	1	Tersedianya kebijakan, proses, dan prosedur yang akan memandu kegiatan APIP dalam pengelolaan operasinya, mengembangkan program kerja pengawasan intern, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan intern.	7	<i>Internal Audit Charter</i> yang kami miliki memuat kewenangan untuk mengakses catatan, personil, kekayaan fisik; kewenangan untuk hadir dalam rapat terkait lingkup kegiatan pengawasan intern; definisi pengawasan intern; Kode Etik dan Standar Pengawasan yang digunakan.	IAC mencantumkan: kewenangan untuk mengakses catatan, personil, kekayaan fisik; kewenangan untuk hadir dalam rapat terkait lingkup kegiatan pengawasan intern; definisi pengawasan intern; Kode Etik dan Standar Pengawasan yang digunakan.	<i>Internal Audit Charter</i>		
				8	Piagam Pengawasan Intern ( <i>Internal Audit Charter</i> ) telah mendapatkan persetujuan secara formal dari Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda.	IAC telah ditandatangani oleh pimpinan K/L/Pemda.	<i>Internal Audit Charter</i>		
				9	Kami telah memiliki kebijakan dalam bentuk peraturan/SK yang mendukung kegiatan pengawasan intern (misalnya: kebijakan SDM, manajemen informasi, dan keuangan).	Terdapat Peraturan/SK/notulen rapat terkait dengan dukungan kegiatan pengawasan intern.	Pedoman/SOP/Juklak tentang kebijakan SDM, manajemen informasi, dan keuangan		
				10	Kami telah memiliki pedoman/juklak	Terdapat pedoman/juklak/SOP	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan		

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			pengawasan intern (metodologi, standar, prosedur, perangkat dalam melakukan kegiatan pengawasan intern).	pengawasan intern.	Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit			
		11	Adanya dokumentasi atas kebijakan, proses, prosedur, dan metodologi pengawasan.	1). Misal: kalau ada crash program yang harus dilaksanakan sehingga mengubah prioritas dalam PKPT, maka kebijakan ini harus didokumentasikan. 2). KKA	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit			
		12	Diterapkannya standar kendali mutu pada setiap penugasan audit.	Penugasan audit sudah menerapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah. Kendali mutu ini harus dibuktikan dengan dokumen kendali mutu atau pernyataan revidi atau paraf atas setiap dokumen pengawasan (seperti form kendali mutu, checklist, dan paraf).	Pemberlakuan kendali mutu audit mengacu ke Permenpan No.19 Thn 2009			
		13	Penugasan pengawasan intern yang kami lakukan telah mengacu pada kebijakan,	1). Terdapat kebijakan, standar, pedoman, dan prosedur yang diacu. 2). APIP sudah melakukan	Pemberlakuan kendali mutu audit mengacu ke Permenpan No.19 Thn 2009			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban			
						Ya	Sebagian	Tidak	
			standar, pedoman dan prosedur yang ditetapkan.	<i>internal quality assessment</i> (bisa <i>self-assessment</i> ; atau <i>self-assessment</i> dengan <i>validation</i> oleh pihak lain di luar APIP; atau <i>external quality assessment</i> oleh pihak lain di luar APIP) untuk menilai kesesuaian penugasan pengawasan intern dengan kebijakan, standar, pedoman dan prosedur yang ditetapkan.					
<b>LEVEL 3</b>									
1	Adanya perencanaan audit berbasis risiko.	1	Terlaksananya penilaian risiko secara sistematis dan fokus pada prioritas rencana kegiatan periodik APIP (audit, evaluasi, reviu, pemanataan, jasa lain) atas gambaran risiko organisasi IP secara keseluruhan.	14	Kami telah melakukan pemutakhiran data/informasi semua unit kerja yang dapat diawasi ( <i>audit universe</i> ).	Terdapat pemutakhiran data terkait obyek pengawasan.	<i>Audit Universe</i> /Peta Auditan termasuk identifikasi dan penanganan risiko		
				15	Kami telah mengidentifikasi unit kerja auditi yang memiliki risiko tertinggi.	APIP telah menentukan besaran risiko atas seluruh auditi dengan memperhatikan unsur-unsur risiko.	<i>Audit Universe</i> /Peta Auditan termasuk identifikasi dan penanganan risiko		
				16	Kami telah menentukan probabilitas terjadinya	APIP telah menentukan besaran risiko atas	<i>Audit Universe</i> /Peta Auditan termasuk		

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan unit kerja auditi.	seluruh auditi dengan memperhatikan unsur-unsur risiko.	identifikasi dan penanganan risiko			
		17	Kami telah mengidentifikasi alternatif penanganan risiko yang dilakukan oleh manajemen.	Terdapat dokumentasi atas alternatif penanganan risiko yang dilakukan oleh manajemen.	<i>Audit Universe</i> /Peta Auditan termasuk identifikasi dan penanganan risiko			
		18	Kami telah mengidentifikasi penanganan tambahan atau penanganan lain yang diperlukan untuk merespon risiko.	Terdapat dokumentasi atas alternatif penanganan risiko yang dilakukan oleh manajemen.	<i>Audit Universe</i> /Peta Auditan termasuk identifikasi dan penanganan risiko			
		19	Perencanaan penugasan kami, juga telah mencakup pengawasan atas auditi yang memiliki risiko tinggi, dan/atau penanganannya belum tepat.	PKPT/PKAT mencantumkan kegiatan pengawasan atas obyek pemeriksaan yang memiliki risiko tinggi, dan/atau manajemen belum menangani risiko tsb dengan tepat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i></li> <li>• SOP Penyusunan PKPT Berbasis Risiko</li> </ul>			
		20	Kami telah membandingkan rencana pengawasan yang akan dilakukan (audit, reviu, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan lainnya) dengan tujuan strategik organisasi, untuk memastikan keduanya telah selaras.	Seluruh kegiatan pengawasan yang tercantum dalam PKPT/PKAT telah mempertimbangkan kesesuaian dengan pencapaian tujuan K/L/Pemda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i></li> <li>• SOP Penyusunan PKPT Berbasis Risiko</li> </ul>			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban				
						Ya	Sebagian	Tidak		
		21	Kami telah menyusun PKPT yang berbasis risiko (berdasar hasil penilaian risiko auditi).	APIP menyusun PKPT berdasarkan besaran risiko atas seluruh auditi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i></li> <li>• SOP Penyusunan PKPT Berbasis Risiko</li> </ul>					
		22	Dilakukannya komunikasi informasi mengenai risiko dan pengendaliannya kepada Pimpinan Kementerian /Lembaga /Pemda.	Terdapat notulen hasil rapat dengan pimpinan K/L/Pemda mengenai risiko dan pengendaliannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Penyusunan PKPT Berbasis Risiko</li> <li>• <i>Audit Universe</i>/Peta Auditan termasuk identifikasi dan penanganan risiko</li> </ul>					
		23	Kami telah melakukan pelatihan perencanaan pengawasan berbasis risiko.	Terdapat laporan hasil pelatihan perencanaan pengawasan berbasis risiko.	Dokumen rencana <i>training</i> untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa <i>advisory</i>					
2	APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola kualitas.	1	Ditetapkan dan dipeliharanya proses untuk pemantauan berkelanjutan, menilai, dan memperbaiki efektivitas kegiatan pengawasan intern. Proses tersebut mencakup pemantauan internal terus menerus, atas kinerja kegiatan penagawasan intern sebagaimana	24	Kami telah mengembangkan kebijakan, praktik, dan prosedur yang dapat memberikan kontribusi perbaikan berkelanjutan bagi kegiatan pengawasan intern .	Kebijakan, praktik, dan prosedur yang dibangun termasuk diantaranya adanya proses kendali mutu atas pelaksanaan pengawasan intern.	Pedoman/Panduan Perencanaan,Pelaksanaan dan Pelaporan atas Audit 3 E, pemberian layanan <i>advisory</i> )			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
	penilaian kualitas yang dilakukan secara periodik (oleh pihak internal dan eksternal).							
		25	Kami telah mengembangkan dan mendokumentasikan peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam melaksanakan, mereviu, dan memberi persetujuan atas hasil penugasan pengawasan intern pada setiap tahapan proses penugasan pengawasan.	1). Terdapat supervisi atas setiap tahapan pekerjaan audit: ketua tim menyupervisi anggota timnya, pengendali teknis mengawasi tim audit yang dibawahinya dan pengendali mutu menyupervisi seluruh kerja audit yang dilaksanakan. 2). Supervisi tsb didokumentasikan dalam KKA.	Pedoman/Panduan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan atas Audit 3 E, pemberian layanan <i>advisory</i> )			
		26	Kami telah melaksanakan dan memelihara kegiatan program <i>quality assurance</i> dan perbaikannya ( <i>Quality Assurance and Improvement Program</i> ).	APIP melakukan <i>Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)</i> secara periodik terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan guna memastikan kesesuaian penugasan pengawasan tsb dengan standar yang ditetapkan (Standar Audit yang dikeluarkan AAIP, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2009	Pedoman telaahan sejawat dan pemberlakuannya.			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
				tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah, pedoman telaahan sejawat). <i>QAIP</i> tsb bisa dilakukan dengan <i>self-assessment</i> ; atau <i>self-assessment</i> dengan <i>validation</i> oleh pihak lain di luar APIP; atau <i>external quality assessment</i> oleh pihak lain di luar APIP.				
		27	Kami telah mengembangkan sistem dan prosedur untuk memonitor dan melaporkan pelaksanaan program <i>quality assurance</i> dan perbaikannya ( <i>Quality Assurance and Improvement Program</i> ).	Laporan hasil pelaksanaan <i>QAIP</i> .	Pedoman telaahan sejawat dan pemberlakuannya			
		28	Kami telah mengembangkan sistem dan prosedur untuk memonitor dan melaporkan kinerja dan efektivitas kegiatan APIP, misal: penerapan <i>peer review</i> , kecukupan pemenuhan <i>internal audit charter</i> , kontribusi APIP bagi auditi (dalam tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko), dll.	Laporan <i>peer review</i> atau laporan hasil survey kepuasan <i>stakeholders</i> terhadap peran dan layanan yang diberikan APIP.	Pedoman telaahan sejawat dan pemberlakuannya			
		29	Kami telah	Terdapat rekomendasi	Pedoman telaahan			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			mengembangkan sistem dan prosedur untuk menindaklanjuti pelaksanaan rekomendasi yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta kesesuaian dengan standar.	dalam laporan <i>QAIP</i> yang ditindaklanjuti APIP.	sejawat dan pemberlakuannya			
		30	Praktik pengawasan yang kami lakukan telah meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.	Hasil <i>QAIP</i> beberapa periode menyatakan bahwa penugasan pengawasan oleh APIP secara umum telah sesuai standar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pernyataan independensi dan objektivitas auditor</li> <li>• Kuesioner Kepuasan Pelanggan</li> </ul>			
<b>Level 4</b>								
1	Adanya strategi pengawasan yang dapat meningkatkan pengelolaan risiko organisasi.	1	Adanya hubungan antara rencana kegiatan periodik pengawasan intern dengan praktik-praktik dan strategi manajemen risiko organisasi yang diawasi (ERM organisasi)	31	<u>Strategi pengawasan</u> yang kami susun telah mencakup area-area yang dianggap oleh manajemen memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil manajemen risiko organisasi K/L/Pemda secara keseluruhan ( <u>Enterprise Risk Management /ERM</u> ).			
				32	Unit kerja kami terus menerus memantau profil risiko organisasi K/L/Pemda dan merevisi rencana pengawasan jika diperlukan serta memperoleh persetujuan Pimpinan			



Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			Kementerian/Lembaga/ Pemda.					
		33	Kami telah memahami strategi dan praktik manajemen risiko organisasi melalui <u>konsultasi dengan Pimpinan K/L/Pemda</u> dan mereviu dokumen yang relevan, baik dari internal maupun eksternal organisasi.					
		34	Unit kerja kami secara periodik telah melakukan audit manajemen risiko dalam skope yang luas ( <i>enterprise-wide risk management audit</i> ).					
<b>Level 5</b>								
1	Adanya rencana Strategis Pengawasan Intern.	1	Dipahaminya arah strategi organisasi IP auditi dan risiko serta isu penting, serta merancang perubahan keahlian /kapabilitas APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern untuk memenuhi kebutuhan potensial di masa mendatang.	35	Kami telah memiliki <u>rencana strategis pengawasan (Renstra APIP)</u> dengan pendekatan yang <u>fleksibel dan dinamis</u> , serta <u>selaras</u> dengan arah <u>strategi organisasi K/L/Pemda</u> untuk menangani <u>risiko dan isu yang potensial</u> .			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
		36	Kami telah mengidentifikasi dan menilai trend, isu, dan risiko baik pada lingkungan internal maupun eksternal organisasi, serta mendiskusikannya secara <u>intensif</u> dengan Pimpinan K/L/Pemda.					
		37	Kami telah melakukan <u>penilaian yang komprehensif</u> untuk mengidentifikasi <u>kesenjangan</u> dalam praktik, sarana, dan keahlian yang dibutuhkan dalam rangka <u>merespon isu-isu dan risiko-risiko</u> organisasi yang berkembang saat ini.					
		38	Kami telah melakukan penilaian atas pilihan-pilihan penanganan risiko yang berkembang untuk <u>mengatasi kesenjangan yang ada</u> . (seperti melakukan revisi atau menambah prosedur, praktik, dan/atau sarana, menambah staf lain, dan/atau melakukan <i>co-sourcing</i> )					
		39	Kami telah <u>memastikan</u> bahwa semua auditor internal telah mengikuti program pendidikan dan					

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			pengembangan profesional berkelanjutan secara <u>tepat</u> . (idealnya 30 sd 40 jam per pegawai per tahun).					
		40	Kami telah melakukan <u>revisi dan penyesuaian</u> terhadap <i>Internal Audit Charter</i> , kebijakan, praktik, dan prosedur kegiatan pengawasan intern secara berkala untuk <u>memastikan kesesuaiannya</u> dengan standar internasional.					
		41	Kami telah melakukan pemantauan sistem manajemen kinerja pengawasan untuk menilai hasil dan mengambil tindakan dalam rangka meningkatkan kinerja.					
		42	Kami telah <u>berkontribusi</u> untuk <u>asosiasi profesi yang relevan</u> guna mendapatkan pembelajaran dan penerapan praktik-praktik terbaik pengawasan intern terkini.					
		43	Kebijakan dan praktik pengawasan intern yang kami lakukan telah sesuai dengan standar dunia (sesuai dengan					

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			hakekat: definisi internal auditing, kode etik, standar, independensi dan obyektivitas, pelaporan yang valid dan dapat diandalkan).					

**FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP  
ELEMEN IV: AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA**

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban				
						Ya	Sebagian	Tidak		
<b>LEVEL 2</b>										
1	Adanya perencanaan kegiatan pengawasan	1	Memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) penugasan pengawasan yang mencakup seluruh sumber daya yang dibutuhkan.	1	Kami telah memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang di dalamnya telah mengidentifikasi sasaran dan hasil-hasil yang ingin dicapai.	Sebagaimana indikator dalam kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Perencanaan Kinerja dan subkomponen Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014).	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (RENJA)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP			
		2	RKT kami telah mempertimbangkan pelayanan penunjang dan administrasi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan yang efektif (misal: SDM, material, teknologi informasi).		Sebagaimana indikator dalam kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Perencanaan Kinerja dan subkomponen Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014).	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (RENJA)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP				
		3	RKT yang kami susun mencakup penetapan jadwal dan penetapan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.		Sebagaimana indikator dalam kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Perencanaan Kinerja dan subkomponen Dokumen Rencana Kinerja Tahunan	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (RENJA)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP				

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
				(PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014).				
		4	Dalam RKT, kami telah mengembangkan langkah-langkah penting untuk mencapai sasaran yang diharapkan	Sebagaimana indikator dalam kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Perencanaan Kinerja dan subkomponen Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014).	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (RENJA)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP			
		5	RKT yang disusun menyediakan instrumen untuk mengendalikan operasional kegiatan pengawasan (rencana/target atas inputs, outputs, outcomes).	Sebagaimana indikator dalam kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Perencanaan Kinerja dan subkomponen Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014).	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (RENJA)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP			
		6	RKT yang kami susun telah memperoleh persetujuan dari pimpinan Kementerian/Lembaga/P		Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (RENJA)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			emda.		(DIPA), LAKIP			
		7	Kami memperoleh pengalokasian anggaran untuk kegiatan pengawasan dan dapat mempergunakan anggaran tersebut untuk merencanakan kegiatan pengawasan.		Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (RENJA)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP			
2	Adanya anggaran operasional kegiatan pengawasan.	1	APIP memperoleh pengalokasian anggaran untuk kegiatan pengawasan dan dapat mempergunakan anggaran tersebut untuk merencanakan kegiatan pengawasan.	8	Kami menyusun anggaran secara realistis/wajar untuk kegiatan-kegiatan dan sumber daya yang telah diidentifikasi dalam RKT.			
				9	Anggaran operasional kami telah disahkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/P emda.			
				10	Kami selalu melakukan reviu terhadap anggaran operasional secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun masih realistis dan akurat, dan kami mengidentifikasi dan melaporkan setiap selisih yang ada.	Terdapat laporan hasil reviu anggaran APIP oleh APIP yang bersangkutan.		
					Nota Dinas / instruksi untuk melakukan reviu periodik terhadap ketepatan/ kecukupan anggaran operasional			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban				
						Ya	Sebagian	Tidak		
<b>LEVEL 3</b>										
1	Adanya laporan manajemen kegiatan pengawasan.	1	APIP mendayagunakan informasi untuk mengelola operasional hariannya, mendukung proses pengambilan keputusan, serta membangun akuntabilitas.	11	Kami telah mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan pelaporan manajemen APIP untuk kepentingan pertanggungjawaban dan akuntabilitas manajemen APIP (misal: identifikasi jenis dan model pelaporan yang perlu disediakan oleh manajemen APIP).	Laporan pelaksanaan pengawasan intern kepada pimpinan K/L/D	Kebijakan dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban kinerja			
				12	Kami telah mengembangkan sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data yang relevan untuk tujuan pelaporan kegiatan pengawasan intern.	APIP memiliki sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data yang relevan untuk tujuan pelaporan kegiatan pengawasan intern.	Aplikasi sistem informasi berbasis teknologi untuk pengelolaan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti: SIM HP; SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPM S			
				13	Kami telah merancang laporan seluruh hasil kegiatan pengawasan intern untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan para pemangku kepentingan yang utama.		Aplikasi sistem informasi berbasis teknologi untuk pengelolaan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti: SIM HP; SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPM S			



Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban				
						Ya	Sebagian	Tidak		
		14	Kami telah menyediakan laporan dan informasi yang relevan secara tepat waktu dan berkala.		SOP mengenai Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan					
		15	Kami telah melakukan pemantauan penggunaan laporan dan informasi untuk melihat apakah masih relevan, dan melakukan perbaikan apabila diperlukan.	APIP telah melakukan survei kepuasan penggunaan laporan atau mengadakan pertemuan rutin dengan pengguna / stakeholder untuk mendapatkan respon terkait informasi laporan.	SOP mengenai Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan					
		16	Akuntabilitas dan tanggung jawab manajemen dalam kegiatan pengawasan intern telah dapat kami penuhi melalui pelaporan kegiatan pengawasan yang tepat waktu, relevan, dan dapat diandalkan.	Laporan kinerja dan akuntabilitas APIP telah tepat waktu, relevan, dan dapat diandalkan.	Kebijakan dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban kinerja					
2	Adanya informasi mengenai biaya	1	APIP memiliki sistem informasi keuangan yang dapat menyediakan informasi keuangan yang memadai sehingga APIP dapat mengelola aktivitasnya seekonomis dan seefisien mungkin.	17	Kami telah mengembangkan sistem informasi biaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.	1). Terdapat mekanisme untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait biaya untuk melaksanakan kegiatan APIP. 2). APIP telah memiliki kebijakan/ prosedur pelaporan informasi biaya. 3). APIP telah memiliki sistem informasi biaya yang relevan dan handal.	Aplikasi sistem informasi berbasis teknologi untuk pengelolaan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti: SIM HP; SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPM S			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
		18	Kami telah menerapkan sistem manajemen biaya pengelolaan kegiatan pengawasan intern yang selaras dengan sistem manajemen keuangan dan operasional K/L/Pemda serta pelaporannya.		Aplikasi sistem informasi berbasis teknologi untuk pengelolaan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti: SIM HP; SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPM S			
		19	Kami telah memantau biaya yang sebenarnya dibandingkan dengan biaya standar atau biaya yang telah ditetapkan pada berbagai tahap kegiatan pengawasan intern.	Dokumen <i>analisis variance</i> biaya.	Aplikasi sistem informasi berbasis teknologi untuk pengelolaan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti: SIM HP; SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPM S			
		20	Kami telah memantau sistem manajemen biaya secara berkala dan memastikan bahwa struktur biaya masih relevan dan informasi bahwa biaya tersebut dihasilkan/diperoleh dengan cara yang paling efisien dan ekonomis.	Dokumen monitor sistem manajemen biaya.	Aplikasi sistem informasi berbasis teknologi untuk pengelolaan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti: SIM HP; SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPM S			
		21	Kami telah memanfaatkan informasi	Dokumen tindak lanjut hasil analisis <i>variance</i>	Aplikasi sistem informasi berbasis			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban			
						Ya	Sebagian	Tidak	
			biaya untuk pengendalian biaya program / kegiatan pengawasan yang dilakukan dan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan.	dan Dokumen monitor sistem manajemen biaya.	teknologi untuk pengelolaan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti: SIM HP; SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPM S				
3	Adanya sistem pengukuran kinerja	-	APIP telah mengembangkan indikator-indikator dan alat ukur yang memungkinkanya mengukur dan melaporkan kinerjanya dan melakukan pemantauan secara rutin atas kemajuan pencapaian target guna memastikan bahwa hasil dicapai seekonomis dan seefisien mungkin	22	Kami telah menetapkan kegiatan pengawasan intern yang perlu diukur kinerjanya	Dokumen Sistem Manajemen Kinerja / SOP yang mengatur pengembangan dan penetapan <i>key performance indicator (KPI)</i> .	Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin)		
				23	Kami telah mendokumentasikan Sistem Manajemen Kinerja dalam pengelolaan kegiatan pengawasan intern, yang mencakup: identifikasi data kinerja yang harus dikumpulkan, frekuensi pengumpulan data, siapa yang bertanggung jawab untuk pengumpulan data, pengendalian mutu data, siapa yang menghasilkan laporan data kinerja, dan siapa yang menerima laporan.		SOP dan Aplikasi Pengukuran Manajemen Kinerja		

Key Process Area	No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
	24	Kami telah mengembangkan ukuran-ukuran kinerja (rasio input/output, indikator produktivitas).	APIP memiliki dokumen pengembangan /penyusunan <i>key performance indicator (KPI)</i> yang layak untuk mengukur kinerja aktivitas APIP.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Rencana Kerja (RENJA) / Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Tapkin/RENSTRA			
	25	Kami telah menetapkan target kinerja.	Dokumen <i>KPI</i> yang terukur secara kuantitatif.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Rencana Kerja (RENJA) / Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Tapkin/RENSTRA			
	26	Kami telah menggunakan informasi kinerja untuk memantau kegiatan pengawasan intern dan hasilnya dibandingkan dengan tujuan yang telah kami tetapkan guna mengambil tindakan yang diperlukan.	Dokumen monitoring pengukuran dan analisis kinerja, sesuai <i>KPI</i> .	LAKIP			
	27	Kami telah melaporkan kinerja kegiatan pengawasan intern kapan saja dibutuhkan oleh pimpinan K/L/Pemda dan/atau pihak terkait.		LAKIP			
	28	Kami telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas biaya dan relevansinya dengan ukuran-ukuran kinerja.		LAKIP			
	29	Sistem pengukuran kinerja kami dapat menginformasikan bagaimana operasional	Dokumen analisis/evaluasi hasil pengukuran KPI dengan pencapaian tujuan	LAKIP			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			harian kegiatan pengawasan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan K/L/Pemda secara keseluruhan.	aktivitas APIP dan tujuan organisasi Pemda/KL.				
<b>Level 4</b>								
1	Adanya integritas atas pengukuran kinerja kuantitatif maupun kualitatif.	1	APIP dapat menggunakan informasi kinerja untuk mengukur dan memantau fluktuasi yang mempengaruhi hasil-hasil kegiatan pengawasannya.	30	Kami telah mengidentifikasi dengan jelas tujuan strategis unit kerja kami.			
				31	Kami telah mengembangkan <u>ukuran-ukuran dan target-target kinerja yang komprehensif</u> yang dapat menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima ( <i>acceptable risk</i> ), biaya, kualitas, dan hasil yang ingin dicapai.			
				32	Kami telah mengembangkan sistem untuk mengukur dan memantau kinerja kuantitatif dan kualitatif.			
				33	Kami telah menggunakan informasi kinerja untuk memonitor dan mengukur fluktuasi kinerja yang dapat mempengaruhi hasil-hasil			

Key Process Area	No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
		kegiatan pengawasan.					
	34	Kami telah menggunakan informasi kinerja untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mengurangi dampak dari risiko organisasi K/L/Pemda.					
	35	Kami telah meminta masukan secara berkala dari para pemangku kepentingan utama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kegiatan pengawasan intern.					
	36	Kami telah mengintegrasikan hasil-hasil dari program perbaikan dan pengendalian mutu dengan sistem manajemen kinerja, dan menggunakan informasinya untuk meningkatkan kinerja.					
	37	Kami telah melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi APIP oleh manajemen organisasi untuk mengukur dampak ( <i>impact</i> ) dan nilai tambah dari kegiatan pengawasan.					
	38	Kami telah <u>mengintegrasikan</u>					

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			sepenuhnya ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk memastikan bahwa tujuan strategis kami telah tercapai.					
<b>LEVEL 5</b>								
1	Adanya pelaporan kepada publik atas efektivitas kegiatan pengawasan internal.	-	APIP melaporkan kepada publik efektivitasnya untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kepada para pemangku kepentingan organisasi dan publik.	39	Kami telah membangun instrumen untuk mengukur dampak dari kegiatan pengawasan yang kami lakukan.			
				40	Kami telah mengidentifikasi dampak dari kegiatan pengawasan pada tataran organisasi K/L/Pemda yang mencakup kemungkinan pengurangan risiko, penghematan biaya, dan perbaikan keuangan organisasi.			
				41	Kami telah melaporkan kinerja pengawasan kami kepada para pemangku kepentingan eksternal (misal: BPK, BPKP, Inspektorat lain, dan KPK) dan publik.			
				42	Kami telah memperoleh masukan dari pemangku			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			kepentingan eksternal (misal: BPK, BPKP, Inspektorat lain, dan KPK) dan publik untuk memperbaiki efektivitas APIP.					
		43	Kami telah memberikan <u>nilai tambah</u> ( <i>value added</i> ) dan <u>berkontribusi nyata</u> dalam perbaikan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian K/L/Pemda.					



**FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP  
ELEMEN V: BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI**

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
<b>LEVEL 2</b>								
1	Adanya pengelolaan atas bisnis proses pengawasan intern	1	APIP fokus pada pembinaan dan pembenahan hubungan dan infrastruktur di dalam lingkungan internalnya sendiri, yang mencakup struktur organisasi, manajemen SDM, penyusunan dan pemantauan anggaran, rencana tahunan, pemenuhan perangkat dan teknologi pengawasan intern, dan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern itu sendiri.	1	Kami telah memiliki struktur organisasi untuk melaksanakan pengawasan intern sesuai peraturan yang berlaku yang ditetapkan secara formal dalam bentuk peraturan atau SK Pimpinan K/L/Pemda.			
		2			Kami telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab seluruh pejabat struktural di lingkungan kami.			
					Uraian jabatan yang disusun berdasarkan atas analisis jabatan (termasuk peraturan pemberlakuannya)			

Key Process Area	No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
	3	Kami telah memiliki aturan, arahan, dan sarana komunikasi di lingkungan internal APIP.	Misal: terdapat mekanisme rapat internal APIP secara berkala.	Nota Dinas/ Memo / SE tentang penyelenggaraan komunikasi internal APIP			
	4	Kami telah membina hubungan dan mendorong komunikasi yang efektif di lingkungan internal APIP.	Misal: terdapat suatu forum yang mengumpulkan tim audit dalam APIP untuk dapat saling berbagi informasi; terdapat moment pembekalan kepada tim audit oleh pimpinan APIP; terdapat forum ekspos hasil-hasil audit.	Nota Dinas/ Memo / SE tentang penyelenggaraan komunikasi internal APIP			
	5	Kami telah menganalisis kebutuhan dan memperoleh sumber daya dan perangkat pengawasan intern termasuk perangkat berbasis teknologi untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan pengawasan intern.	1). Analisis kebutuhan sumber daya didokumentasikan. 2). APIP memiliki sumber daya dan perangkat pengawasan intern termasuk perangkat berbasis teknologi sesuai yang dibutuhkan.	Aplikasi sistem informasi berbasis teknologi seperti SIM HP ; SIM Monev			
	6	Struktur organisasi kami telah tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi K/L/Pemda.	Struktur organisasi APIP memungkinkan APIP untuk berkomunikasi secara langsung dengan pucuk pimpinan organisasi, dan memungkinkan APIP untuk dapat melakukan pengawasan tanpa ada pembatasan akses ke seluruh unit organisasi.	Peraturan tentang SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) dimana APIP secara fungsional bertanggung jawab langsung kepada Pucuk Pimpinan K/L/D			
<b>LEVEL 3</b>							

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban				
						Ya	Sebagian	Tidak		
1	APIP bersama-sama dengan unit lain dalam organisasi merupakan satu tim manajemen.	-	APIP berpartisipasi secara aktif dalam manajemen organisasi sebagai bagian dari tim manajemen yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.	7	Jajaran pimpinan APIP telah memahami prioritas manajemen dan senantiasa mengikuti perubahan terkait proses bisnis serta hal-hal baru dalam organisasi K/L/Pemda.	Jajaran pimpinan APIP selalu diundang untuk mengikuti rapat manajemen puncak organisasi (ada notulennya).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK TPTGR, SK Baperjakat</li> <li>• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i>, dan usulan perubahannya</li> <li>•</li> </ul>			
			Pimpinan organisasi K/L/Pemda menyampaikan rencana organisasi dan informasi penting serta laporan lainnya kepada pimpinan kami (misalnya, rencana strategis dan rencana kegiatan serta laporan keuangan).	8			Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Rencana Kerja (RENJA) / Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Tapkin/RENSTR A			
			Pimpinan unit APIP telah menginformasikan dan mendiskusikan rencana dan isu-isu organisasi K/L/Pemda dengan seluruh staf di lingkungan APIP.	9	Terdapat notulen/laporan hasil forum/rapat tsb.		Nota Dinas/ Memo / SE Tentang penyelenggaraan komunikasi internal APIP			
			Pimpinan APIP ikut berpartisipasi dan hadir dalam forum-forum penting yang diselenggarakan organisasi K/L/Pemda guna mengetahui perkembangan strategis dan operasional kegiatan pengawasan	10	Terdapat notulen/laporan hasil forum/rapat tsb.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kegiatan-kegiatan penting dalam organisasi K/L/D dimana Pimpinan APIP menjadi bagian yang terintegrasi dalam tim manajemen K/L/D</li> <li>• SK TPTGR, SK Baperjakat</li> </ul>				

Key Process Area	No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
		intern serta isu-isu tentang risiko, sistem, prosedur, dan jenis pengendalian pada kegiatan pengawasan intern.					
	11	Pimpinan kami telah mendorong staf pengawasan untuk terlibat dalam komite-komite organisasi K/L/Pemda (seperti satgas, forum) yang penting apabila diperlukan.	Terdapat SK satgas, forum, dll.	Pembentukan Forum, Satgas untuk berbagai pengetahuan			
	12	Kami telah mempertimbangkan masukan dari manajemen dalam pengembangan rencana kegiatan pengawasan.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i></li> <li>• SOP Penyusunan PKPT Berbasis Risiko</li> </ul>			
	13	Kami telah saling bertukar informasi dengan jajaran pimpinan K/L/Pemda secara berkala terkait dengan rencana dan kegiatan pengawasan intern.	Terdapat notulen/laporan hasil forum/rapat tsb.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i></li> <li>• SOP Penyusunan PKPT Berbasis Risiko</li> </ul>			
	14	Unit kerja kami menjadi penghubung organisasi K/L/Pemda (sebagai wakil manajemen) dalam berkoordinasi dengan auditor eksternal.		<i>Internal Audit Charter</i> (yang mencakup layanan audit kinerja-3E, pemberian layanan <i>advisory</i> )			
	15	Jajaran pimpinan unit kerja kami dipandang sebagai bagian yang	Jajaran pimpinan APIP selalu diundang untuk mengikuti rapat				

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			tidak terpisahkan (penting) dalam tim manajemen organisasi K/L/Pemda dan masukannya dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.	manajemen puncak organisasi (ada notulennya).				
2	APIP berkoordinasi dengan pihak lain yang menyediakan jasa pemberian advis dan penjaminan ( <i>other review groups</i> ).	16	APIP berbagi informasi dan berkoordinasi dengan pihak external maupun internal yang terkait dengan penyediaan jasa pemberian advis dan penjaminan ( <i>providers of assurance and advisory services</i> ) untuk memastikan cakupan pelayanan dan meminimalisir duplikasi kegiatan pengawasan.	Kami telah mengidentifikasi pihak-pihak selain kami yang memberikan jasa penjaminan ( <i>assurance</i> ) dan pemberian saran ( <i>advisory services</i> ) bagi organisasi K/L/Pemda (seperti BPKP, KAP, BPK, Inspektorat lain).	<i>Internal Audit Charter</i> (antara lain mencakup hubungan kerja dan koordinasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya)			
		17	Kami telah mengidentifikasi area-area yang dapat memberikan manfaat melalui berbagi perencanaan, informasi, maupun hasil kegiatan pengawasan dengan pihak lain tersebut (seperti BPKP, KAP, BPK, Inspektorat lain).		<i>Internal Audit Charter</i> (antara lain mencakup hubungan kerja dan koordinasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya)			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
		18	Kami telah mengembangkan proses atau mekanisme untuk berbagi informasi maupun berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain tersebut terkait dengan isu-isu yang menjadi perhatian bersama.	Proses atau mekanisme untuk berbagi informasi maupun berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain tersebut dapat berupa rapat, forum, dll. (ada notulen/laporannya).	Kebijakan/mekanisme koordinasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya yang sama-sama melakukan fungsi reviu lain seperti APIP lain dan eksternal auditor BPK, KPK; dalam perencanaan pengawasan atau pemanfaatan hasil pengawasan			
		19	Kami telah secara reguler berkomunikasi dengan auditor eksternal dan berbagi informasi rencana kerja untuk saling mendukung dan melengkapi.		Pelaksanaan rapat koordinasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya			
		20	Komunikasi yang dilakukan dengan auditor eksternal maupun dengan pihak penyedia jasa lainnya telah dapat meminimalisir duplikasi atas kegiatan pengawasan dan memaksimalkan cakupan kegiatan pengawasan.					
<b>Level 4</b>								
1	Pimpinan APIP mampu memberikan	- Adanya pemahaman organisasi dan penghargaan atas	21	Pimpinan kami secara berkala berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan				

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
saran-saran dan mempengaruhi jajaran manajemen organisasi.	visi, kepemimpinan, dan pandangan ke depan pimpinan APIP.		pimpinan tertinggi K/L/Pemda.					
	- Adanya hubungan yang baik antara pimpinan APIP dengan jajaran manajemen organisasi.	22	Pimpinan kami telah memberikan kontribusi terhadap K/L/Pemda dengan memberikan sumbang saran atas isu-isu penting dan strategis.					
		23	Pimpinan kami telah mengembangkan budaya kerjasama dan kepercayaan antara auditor dengan jajaran pimpinan organisasi baik untuk kegiatan pengawasan intern maupun terkait isu-isu organisasi					
		24	Pimpinan kami telah berbagi pengetahuan tentang praktik terbaik dalam operasional organisasi dengan seluruh unit kerja/SKPD di lingkungan K/L/Pemda.					
		25	Pimpinan kami telah menetapkan suatu contoh nyata mengenai manajemen yang efektif, etis, dan berwawasan berdasarkan saran-saran dan petunjuk					

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			yang diberikan kepada pihak lain sebelumnya.					
		26	Pimpinan kami telah mendukung manajemen K/L/Pemda dengan mengembangkan hubungan yang kooperatif, transparan, dan formal dengan auditor eksternal dan mendorong auditor eksternal untuk senantiasa memanfaatkan hasil pengawasan intern.					
		27	Jajaran pimpinan K/L/Pemda mempercayai dan menghargai saran-saran yang kami berikan.					
<b>LEVEL 5</b>								
1	Adanya hubungan yang efektif dan berkesinambungan.	-	APIP mampu memelihara hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan dan jajaran pimpinan/manajemen organisasi	28	Kami telah berpartisipasi dan menjadi pengamat pada semua komite atau forum-forum penting organisasi K/L/Pemda (misalnya dalam forum penyusunan anggaran K/L/Pemda).			
				29	Kami telah memfasilitasi pembelajaran organisasi melalui identifikasi perubahan di lingkungan global yang berpengaruh terhadap organisasi.			
				30	Kami telah memiliki			



Key Process Area	No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
		suatu mekanisme untuk melakukan pertemuan secara berkala dengan pimpinan K/L/Pemda dan para pemangku kepentingan utama.					
	31	Para pemangku kepentingan utama, jajaran pimpinan organisasi K/L/Pemda, dan komite audit memahami dan menghargai unit kami.					
	32	Kami dipandang sebagai partner bisnis yang mumpuni/kredibel di seluruh organisasi K/L/Pemda.					
	33	Visi dan nilai-nilai unit kami sesuai dengan visi dan nilai-nilai organisasi K/L/Pemda dan selaras dengan pemangku kepentingan utama.					
	34	Unit kami memegang peranan penting dalam pengembangan komitmen pimpinan					
	35	Auditor eksternal mengandalkan hasil-hasil pekerjaan kami.					

**FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP  
ELEMEN VI: STRUKTUR TATA KELOLA**

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban			
						Ya	Sebagian	Tidak	
<b>LEVEL 2</b>									
1	Hubungan pelaporan telah terbangun.	1	APIP telah membangun hubungan pelaporan (laporan kegiatan dan laporan administrasi) secara formal di lingkungannya.	1	<i>Internal audit charter</i> telah mendefinisikan secara formal visi, misi, tujuan, wewenang, dan tanggung jawab unit APIP, dan telah memperoleh persetujuan secara formal dari pimpinan organisasi K/L/Pemda.	<i>Internal Audit Charter</i>			
		2	Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab unit APIP telah dikomunikasikan ke seluruh organisasi K/L/Pemda.		Komunikasi tsb bisa dalam bentuk sosialisasi saat gelar pengawasan, rapat pimpinan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Internal Audit Charter</i></li> <li>• Penyelenggaraan sosialisasi, rapat, dll terkait kewenangan dan tanggung jawab unit APIP yang ada dalam dokumen <i>Internal Audit Charter</i></li> </ul>			
		3	Kami telah memiliki sistem pelaporan kegiatan dan pelaporan administrasi pengawasan ( <i>functional and administrative reporting</i> ) secara formal kepada level pimpinan K/L/Pemda		Ada prosedur/sistem yang menunjukkan bahwa APIP melapor secara fungsional ke Pimpinan K/L/Pemda dan secara administratif ke SekJen/Sesma/Sekda.	SOP mengenai penyampaian Ikhtisar Hasil Pengawasan ke Pimpinan K/L/D			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
		4	Kami telah melakukan reviu dan pemutakhiran <i>internal audit charter</i> secara berkala dan mendapat persetujuan pimpinan organisasi.		<i>Internal Audit Charter</i>			
		5	<i>Internal audit charter</i> dapat dijadikan dasar bagi manajemen organisasi K/L/Pemda untuk mengevaluasi kegiatan unit APIP.		<i>Internal Audit Charter</i>			
2	APIP memiliki akses penuh terhadap informasi, aset, dan personil unit organisasi K/L/Pemda.	1	Adanya kewenangan bagi APIP untuk mengakses informasi, aset, dan personil organisasi K/L/Pemda, yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pengawasan internnya.	6	<i>Internal audit charter</i> telah mencakup kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, aset, dan personil organisasi K/L/Pemda.			
				7	Kami memiliki kebijakan dan prosedur formal terkait dengan kewenangan untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas atas seluruh informasi, aset, dan personil organisasi K/L/Pemda yang diaudit, serta tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup.	<i>Internal Audit Charter</i> dan kebijakan/SOP turunan terkait kewenangan APIP		

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban			
						Ya	Sebagian	Tidak	
		8	Kami telah menetapkan prosedur yang harus diikuti jika auditi tidak mengungkapkan dokumen yang diperlukan selama pelaksanaan tugas pengawasan.	Terdapat SOP mengenai apa yang harus dilakukan auditor jika auditi tidak mengungkapkan dokumen yang diperlukan selama pelaksanaan tugas pengawasan.	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit				
<b>LEVEL 3</b>									
1	Adanya mekanisme penganggaran kegiatan pengawasan.	1	APIP telah membangun proses penganggaran yang transparan dan sehat untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.	9	Penganggaran kami mencakup sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan <i>assurance and advisory services</i> guna mengatasi risiko organisasi yang telah diidentifikasi sebelumnya (proses penganggaran didasarkan pada rencana pengawasan berbasis resiko).		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i></li> <li>• SOP Penyusunan PKPT Berbasis Risiko</li> </ul>		
				10	Kami telah memiliki proses/mechanisme persetujuan terhadap sumber daya yang dibutuhkan (termasuk pendanaan) yang transparan serta kewenangan untuk mengajukan besaran anggaran sesuai yang dibutuhkan.		Kebijakan/Prosedur /Mekanisme Pengajuan Usulan Anggaran APIP dengan memerhatikan risiko organisasi		
				11	Kami telah mengidentifikasi dampak dari adanya pembatasan sumber daya dan telah	Terdapat hasil analisis dampak yang dimaksud.	Kebijakan/Prosedur /Mekanisme Pengajuan Usulan Anggaran APIP dengan		

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban			
						Ya	Sebagian	Tidak	
			mengomunikasikan dampak tersebut kepada jajaran pimpinan dalam organisasi K/L/Pemda.		memerhatikan risiko organisasi				
		12	Kami telah memiliki anggaran yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami secara efektif.						
		13	Alokasi anggaran yang kami terima telah mempertimbangkan risiko dan dampak apabila terdapat kegiatan pengawasan yang tidak dilakukan.						
2	Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan APIP oleh manajemen organisasi K/L/Pemda.	1	Adanya proses/mekanisme dalam organisasi K/L/Pemda yang melibatkan pimpinan organisasi untuk mengawasi, memberikan saran, dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan APIP untuk menguatkan independensi dan memastikan tindakan yang tepat telah dilaksanakan, guna meningkatkan dukungan	14	Kami telah merekomendasikan dan memberikan kontribusi dalam membangun mekanisme/proses yang tepat dalam rangka pengawasan dan pemberian saran oleh jajaran pimpinan K/L/Pemda terkait dengan kegiatan kami.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP mengenai Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan</li> <li>• Laporan ikhtisar hasil pengawasan secara berkala.</li> </ul>		

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
	terhadap APIP dan memperluas ruang lingkup APIP.							
		15	Kami telah membangun kebijakan dan prosedur dalam rangka berkomunikasi, berinteraksi, dan melaporkan kepada jajaran pimpinan K/L/Pemda yang bertugas mengawasi APIP.	Terdapat mekanisme pengawasan oleh jajaran pimpinan organisasi terhadap APIP.	SOP mengenai Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan			
		16	Kami telah melakukan pertemuan secara berkala dengan jajaran pimpinan K/L/Pemda dalam rangka meningkatkan kepedulian organisasi terhadap tata kelola, penilaian risiko, pengawasan internal, dan pentingnya lingkungan pengendalian yang kuat.	Notulen/laporan.	Adanya kegiatan-kegiatan penting dalam organisasi K/L/D dimana Pimpinan APIP menjadi bagian yang terintegrasi dalam tim manajemen K/L/D			

Key Process Area	No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
	17	Kami mendorong jajaran pimpinan K/L/Pemda untuk mendukung independensi APIP melalui usaha-usaha seperti mengomunikasikan mandat, kewenangan, independensi, dan manfaat kegiatan pengawasan intern ke seluruh organisasi.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Internal Audit Charter</i> (yang mencakup layanan audit kinerja-3E, pemberian layanan <i>advisory</i>)</li> <li>• Adanya pihak dalam organisasi Kementerian/Lemba ga /Pemerintah Daerah yang mengawasi kinerja APIP</li> </ul>			
	18	Kami telah mengkoordinasikan kegiatan kami dan berbagi informasi hasil pengawasan kami dengan pihak lain yang memberikan jasa penjaminan ( <i>assurance</i> ) dan pemberian saran ( <i>advisory services</i> ) bagi organisasi K/L/Pemda (seperti BPKP, KAP, BPK, Inspektorat lain).		Kebijakan/mekanisme koordinasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya yang sama-sama melakukan fungsi reuiu lain seperti APIP lain dan eksternal auditor BPK, KPK; dalam perencanaan pengawasan atau pemanfaatan hasil pengawasan			
	19	Adanya penguatan independensi, obyektivitas, dan efektivitas unit kerja kami melalui dukungan nyata dari jajaran pimpinan organisasi K/L/Pemda.		Adanya pihak dalam organisasi Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah yang mengawasi kinerja APIP			
	20	Tidak terdapat duplikasi pengawasan yang dilakukan unit kami dengan pihak lain yang memberikan jasa					

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			penjaminan ( <i>assurance</i> ) dan pemberian saran ( <i>advisory services</i> ) bagi organisasi K/L/Pemda (seperti BPKP, KAP, BPK, Inspektorat lain).					
		21	<i>Internal audit charter</i> telah mencakup aturan mengenai pengawasan terhadap unit kami oleh jajaran pimpinan K/L/Pemda yang diberikan kewenangan untuk mengawasi kinerja APIP.		<i>Internal Audit Charter</i> (yang mencakup layanan audit kinerja-3E, pemberian layanan <i>advisory</i> )			
<b>Level 4</b>								
1	Adanya laporan pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi K/L/Pemda.	1	Adanya penguatan independensi pimpinan APIP dengan membangun mekanisme pelaporan secara langsung kepada pimpinan tertinggi organisasi K/L/Pemda.	22	<i>Internal audit charter</i> telah menggambarkan pola hubungan pelaporan secara langsung dari pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi K/L/Pemda.			
			23	Kebijakan organisasi K/L/Pemda memungkinkan pimpinan kami untuk melakukan pertemuan secara berkala dan berkomunikasi secara langsung dengan pimpinan tertinggi organisasi K/L/Pemda.				
			24	Pola hubungan pelaporan pimpinan APIP dengan				



Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			pimpinan tertinggi organisasi K/L/Pemda memperkuat independensi unit kerja kami dan memungkinkan kami memberikan saran-saran yang bernilai dan terpercaya bagi organisasi.					
2	Adanya pengawasan terhadap APIP oleh pihak independen.	1	Adanya badan pengawas APIP yang anggotanya mencakup pihak independen (di luar jajaran manajemen organisasi K/L/Pemda) guna memastikan independensi APIP, mengembangkan lingkup pengawasan APIP, dan membantu menguatkan akuntabilitas organisasi K/L/Pemda.	25	Adanya badan pengawas independen (di luar jajaran manajemen organisasi K/L/Pemda) yang memberikan pengawasan dan arahan fungsional kepada APIP.			
				26	Kami telah ikut berkontribusi dalam pembentukan dan kinerja badan pengawas independen dengan cara merekomendasikan atribut-atribut keanggotaan, membantu pengembangan aturan, menyediakan dukungan kesekretariatan, dan			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
			mengarahkan agenda.					
		27	Kami telah mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan memberikan laporan kepada badan pengawas independen tersebut.					
		28	Kami telah mengembangkan peran badan pengawas independen dalam memberikan rekomendasi terhadap penunjukkan dan pemberhentian pimpinan unit kerja kami.					
		29	<i>Internal audit charter</i> telah mencakup aturan mengenai pengawasan terhadap unit kami oleh badan pengawas independen.					
<b>LEVEL 5</b>								
1	Adanya independensi, kemampuan, dan kewenangan yang penuh.	1	APIP telah menunjukkan independensi, kemampuan, dan kewenangan yang penuh.	30	Kami telah memiliki independensi, kemampuan, dan kewenangan penuh yang telah diformalkan dalam peraturan dan mandat dengan dukungan manajemen dan badan pengawas independen, dalam menentukan ruang lingkup, melaksanakan dan mengomunikasikan hasil pengawasan.			

Key Process Area		No.	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
		31	Semua ucapan dan tindakan jajaran pimpinan organisasi K/L/Pemda, badan pengawas independen, dan semua pemangku kepentingan telah menunjukkan penerimaan dan dukungan penuh terhadap keberadaan unit kerja kami.					
		32	Budaya organisasi K/L/Pemda secara nyata mengakui dan menerima nilai-nilai dan peran dari pengawasan intern.					
		33	Kami telah membandingkan indikator kunci keberhasilan ( <i>key success factor</i> ) struktur tata kelola kami dengan praktik yang berlaku universal (misal landasan hukum, mandat dari komite audit, <i>internal audit charter</i> , kebijakan organisasi).					
		34	Pemerintah RI dan organisasi K/L/Pemda telah menunjukkan komitmen nyata terkait dengan peran pengawasan intern.					

## Contoh Laporan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

### KOP SURAT APIP YANG BERSANGKUTAN

---

Nomor : ..... Jakarta ..... 20xx  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Hasil Penilaian Kapabilitas Inspektorat  
Jenderal Kementerian ..... per ..... 20xx

Yth. ....  
Di  
.....

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas dan independensi pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, bersama ini disampaikan hasil penilaian yang kami lakukan terhadap kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian ..... per ..... 20xx. Proses penilaian tersebut telah kami laksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan telah menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Hasil penilaian yang dilakukan secara mandiri tersebut menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas kami adalah sebagai berikut:

1. Elemen 1 Peran dan Layanan berada di level .....
2. Elemen 2 Pengelolaan SDM berada di level .....
3. Elemen 3 Praktik Profesional berada di level .....
4. Elemen 4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja berada di level .....
5. Elemen 5 Budaya dan Hubungan Organisasi berada di level .....
6. Elemen 6 Struktur Tata Kelola berada di level .....

Rincian penilaian terlampir.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut BPKP akan menetapkan tingkat kapabilitas kami. Selanjutnya Kami juga akan segera mengembangkan rencana kerja peningkatan kapabilitas.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

....., .....20....

Pimpinan Unit APIP

.....  
NIP.....

Tembusan:

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang .....

Atau

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi .....

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
Jalan Pramuka Nomor 33  
Jakarta Timur  
Telp. 85900031 ext 0102, Fax: 8584985